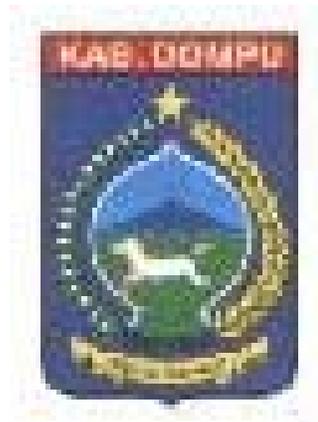


Laporan

**STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2007**



Kantor Pertambangan Energi dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Dompus
Tahun 2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-NYA, akhirnya penyusunan **BUKU LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2007** dapat terselesaikan. Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Dompu terdiri dari dua bagian, yaitu, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Dompu merupakan analisis lingkungan hidup Kabupaten Dompu tahun 2007 dengan menggunakan analisa Status-Pressure-Response yang berdasarkan pada basis data dan Laporan Kumpulan data lingkungan hidup daerah yang merupakan data terkini keadaan lingkungan hidup Daerah Kabupaten Dompu.

Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Dompu tersusun berkat adanya koordinasi yang baik antara instansi yang ada di Kabupaten Dompu, terutama instansi yang terkait penanganan lingkungan hidup, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Walaupun Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Dompu ini telah diupayakan disusun dengan baik, namun disadari masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangatlah diharapkan.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan andil dalam pembuatan buku laporan ini, semoga dapat menjadi salah satu sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, dunia usaha, dan instansi Pemerintah dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Dompu, Nopember 2007
Kepala Kantor Pertambangan Energi
Dan Lingkungan Hidup

Muhammat, ST

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
SAMBUTAN BUPATI DOMPU	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan Laporan	1
1.3. Visi dan Misi Kabupaten Dompu	2
1.3.1. Visi	2
1.3.2. Misi.....	3
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Dompu.....	5
1.4.1. Kondisi Geografis.....	5
1.4.2. Topografi	6
1.4.3. Geologi.....	7
1.4.4. Visi Misi dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Dompu	8
1.4.5. Kependudukan	9
1.4.6. Kesehatan	10
1.4.7. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	13
1.4.7.1. Visi dan Misi RPJM Kabupaten Dompu Tahun 2006-2010.....	13
1.4.7.1.1. Visi.....	13
1.4.7.1.2. Misi.....	14
1.4.7.2. Prioritas Kebijakan Kabupaten Dompu	15
BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA	22
2.1. Ketersediaan AIR Semakin Menurun	22
2.2. Penurunan Kualitas Air.....	24
2.3. Meluasnya Lahan Kritis	25
2.4. Penanganan Sampah dan Masalah Kebersihan Yang Belum Optimal	27
2.5. Kerusakan Terumbu Karang dan Hutan Mangrove.....	29
2.6. Alih Fungsi Lahan.....	30
2.7. Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Peruntukkan	30
2.8. Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	31
BAB III AIR.....	33
3.1. Sumber Daya Air	33
3.2. Pemanfaatan Sumber Daya Air.....	33
3.2.1. Kebutuhan Air Bersih.....	34
3.2.2. Kebutuhan Air Untuk Pertanian	35
3.3. Air Bawah Tanah	35
3.4. Kualitas Air Sungai	36

BAB IV UDARA	37
4.1. Suhu Udara.....	38
4.2. Kualitas Udara	38
BAB V LAHAN DAN HUTAN.....	40
5.1. Lahan.....	40
5.1.1. Kondisi Umum Lahan	40
5.1.2. Penyebab Terjadi Kerusakan Lahan	41
5.2. Hutan	41
5.2.1. Kondisi Umum Hutan	41
5.2.2. Kerusakan Hutan.....	43
5.2.3. Penyebab Terjadi Kerusakan Hutan	44
BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI.....	46
6.1. Kondisi Umum.....	46
6.1.1. Flora	46
6.1.2. Fauna	47
6.2. Flora dan Fauna di Kawasan Tambora.....	47
6.2.1. Flora	47
6.2.2. Fauna	49
6.3. Flora dan Fauna di Taman Wisata Alam Pulau Satonda	50
6.3.1. Kondisi Flora	51
6.3.2. Kondisi Fauna	51
BAB VII PESISIR DAN LAUT	53
7.1. Kondisi Umum Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Dompu.....	53
7.1.1. Morfologi Pantai.....	53
7.1.2. Kondisi Oseanografi.....	54
7.1.2.1. Gelombang.....	54
7.1.2.2. Pasang Surut (Pasut)	55
7.1.2.3. Arus	55
7.1.2.4. Batimetri Perairan Pesisir dan Laut	55
7.2. Kondisi Hutan Mangrove.....	55
7.2.1. Penyebab Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Dompu	57
7.2.1.1. Kerusakan Hutan Mangrove.....	57
7.2.2.2. Kerusakan Terumbu Karang	58
7.2.2. Dampak Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	58
7.2.2.1. Kerusakan Hutan Mangrove.....	58
7.2.2.2. Kerusakan Terumbu Karang	59
BAB VIII AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	60
DAFTAR PUSAKA.....	61

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.	Keadaan Geologi di Kabupaten Dompu	8
TABEL 1.2.	Jumlah Kasus Kematian Bayi Di Kabupaten Dompu Tahun 2003 – 2005	11
TABEL 1.3.	Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Dompu Tahun 2005	13
TABEL 1.4.	Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Dompu Tahun 2005	13
TABEL 3.1.	Jumlah Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Dompu	34
TABEL 4.2.	Komposisi Udara	37
TABEL 6.1.	Jenis Flora yang terdapat di Kawasan SMS di Gunung Tambora Tahun 2005	48
TABEL 6.2.	Jenis Flora yang terdapat di Kawasan SMS di Gunung Tambora Tahun 2005	49
TABEL. 6.3.	Jenis Flora yang terdapat di Taman Wisata Alam Pulau Satonda Tahun 2005	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.	Masyarakat Menggunakan Sungai Sebagai Tempat Mandi.....	24
Gambar. 2.	Sungai Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah.....	25
Gambar. 3.	Kegiatan Penambangan Rakyat di Sungai.....	25
Gambar. 4.	Lahan Kritis Sebagai Akibat Peladangan Liar	26
Gambar. 5.	Peladangan Berpindah-Pindah (Tebang Baker).....	26
Gambar. 6.	Lokasi TPA Bara Dengan <i>System Open Dumping</i>	28
Gambar. 7.	Sarana Pengangkut Sampah Yang Tengah Beroperasi	28
Gambar. 8.	Lahan Pertanian Yang Alih Fungsi Sebagai Pendidikan	30
Gambar. 9.	Pemukiman Yang Tidak Memperhatikan Sepadan Sungai	31
Gambar. 10.	Lahan Yang Ditinggal Oleh Peladangan Liar Tahun 2005	44
Gambar. 11.	Kayu Temuan OLEH Dinas Kehutanan Yang Tidak Bertuah Tahun 2005	44
Gambar. 12.	Peta Lokasi Pesisir dan Laut Kabupaten Dompu	53
Gambar. 13.	Kondisi Beberapa Mortologi Pantai Wilayah Pesisir Dan Laut Kabupaten Dompu	54

ABSTRAK

Kabupaten Dompu merupakan salah satu Kabupaten dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang berada di wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat, yang terletak di Pulau Sumbawa, dengan luas wilayah 2.324,55 Km². Letak Geografis Kabupaten Dompu terletak antara 117^o 42' – 118^o 30' Bujur Timur dan 8^o 06' – 9^o 05' Lintang Selatan dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima, Sebelah Selatan : Lautan Indonesia, Sebelah Timur : Kabupaten Bima, Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa.

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, perekonomian masyarakat semakin membaik dan gencarnya pembangunan yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun oleh swasta. Namun masih menyisakan permasalahan sosial antara lain tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, angka pengangguran masih cukup tinggi, derajat kesehatan yang belum membaik, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam yang kurang memperhatikan faktor lingkungan dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

Berdasarkan pembahasan dan analisa terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Dompu, ada beberapa isu lingkungan hidup utama yang perlu mendapatkan perhatian bersama yaitu : Ketersediaan air semakin menurun, baik untuk kebutuhan air bersih maupun untuk pertanian, Penurunan kualitas air sungai, Meluasnya lahan kritis baik yang terjadi di luar dan di dalam kawasan hutan, Pengelolaan sampah dan kebersihan yang belum optimal, Kerusakan Hutan Mangrove dan terumbu karang, Alih fungsi lahan, Pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan tata ruang, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana tindak lanjut dari permasalahan yang tersebut di atas, dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam secara bijaksana, bermartabat dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kaídah-kaídah lingkungan hidup dengan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Dompu dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup menetapkan kebijakan umum seperti yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Dompu Tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Peningkatan Pengelolaan dan Kinerja Persampahan, Peningkatan Derajat Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Status Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu Tahun 2007 meliputi beberapa aspek yaitu : Lahan Kritis, Peruntukan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Air, dan Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan.

DAFTAR ISI

BAB I	AIR	1
	TABEL 1.1. Pemantauan Kualitas Air	1
	TABEL 1.2. Pemantauan Kualitas Air Tanah	2
	TABEL 1.3. Volume Air/Waduk/Situ	3
	TABEL 1.4. Daftar Sumur Pantau	4
	TABEL 1.5.a Jumlah Curah Hujan	4
	TABEL 1.5.b Jumlah Curah Hujan	5
	TABEL 1.6.a. Sumber Air Baku dan Produksi Bersih PDAM	6
	TABEL 1.6.b. Distribusi Air Bersih PDAM Menurut Jenis Pelanggan	6
	TABEL 1.6.c. Pemanfaatan Air Tanah Berdasarkan Jenis Kegiatan	7
	TABEL 1.7.a. Banyaknya Pupuk dan Pestisida Digunakan di Kolam	7
	TABEL 1.7.b. Banyaknya Pupuk dan Pestisida Digunakan di Tambak	7
	TABEL 1.7.c. Banyaknya Pupuk dan Pestisida Digunakan di Sawah	7
	TABEL 1.8. Hasil Analisa Kualitas Limbah Cair Industri	8
	TABEL 1.9. Hasil Analisa Kualitas Limbah Cair Rumah Sakit	9
	TABEL 1.10. Hasil Analisa Kualitas Limbah Cair Hotel	10
	TABEL 1.11.a Banyaknya Rumah Tangga Bertempat Tinggal di Bantaran Sungai	11
	TABEL 1.11.b Banyaknya Rumah Tangga Tanpa <i>Septic Tank</i>	11
BAB II	UDARA	12
	TABEL 2.1. Kualitas Udara Ambien	12
	TABEL 2.2. Kualitas Air Hujan	13
	TABEL 2.3. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Yang Digunakan	14
	TABEL 2.4. Kondisi Iklim	14
	TABEL 2.5.a. Pemantauan Emisi Industri Besi dan Baja	15
	TABEL 2.5.b. Pemantauan Emisi Industri Pulp dan Kertas	15
	TABEL 2.5.c. Pemantauan Emisi Pembangkit Listrik tenaga Uap	16
	TABEL 2.5.d. Pemantauan Emisi Industri Semen	16
	TABEL 2.5.e. Pemantauan Emisi Industri Bukan Logam	17
	TABEL 2.5.f. Pemantauan Emisi Industri Logam	17
BAB III	LAHAN DAN HUTAN	18
	TABEL 3.1. Luas Hutan Menurut Fungsi/Status	18
	TABEL 3.2. Luas Pengusahaan Hutan Tanaman Industri	18
	TABEL 3.3. Konversi Hutan	19
	TABEL 3.4. Luas Kerusakan Hutan Berdasarkan Penyebabnya	19
	TABEL 3.5. Luas dan Perkiraan Produksi Pertambangan Gol. C	19
	TABEL 3.6. Luas Lahan Kritis	20

	TABEL 3.7.	Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi.....	20
	TABEL 3.8.	Rencana dan Realisasi Kegiatan Penghijauan	21
BAB IV		KEANEKARAGAM HAYATI.....	22
	TABEL 4.1.	Flora Yang Dilindungi/Langka	22
	TABEL 4.2.	Fauna Yang Dilindungi/Langka	22
BAB V		PESISIR DAN LAUT	23
	TABEL 5.1.	Pemantauan Kualitas Air Laut.....	23
	TABEL 5.2.a.	Luas Tutupan Terumbu Karang.....	24
	TABEL 5.2.b.	Persentase Kerusakan Padang Lamun.....	24
	TABEL 5.2.c.	Tutupan dan Kerapatan Mangrove.....	24
	TABEL 5.2.d.	Data Kimia Perairan Teluk Saleh	24
	TABEL 5.3.	Kependudukan Di Laut dan Pesisir	25
	TABEL 5.4.	Budidaya Laut dan Pesisir.....	25
	TABEL 5.5.	Pengelolaan Sampah Di Kawasan Wisata Bahari....	26
	TABEL 5.6.	Abrasi dan Reklamasi.....	26
	TABEL 5.7.	Hasil Analisa Kualitas Limbah Cair Hotel Di Kawasan Wisata Bahari	27
	TABEL 5.8.	Jumlah Hotel/Penginapan Di Kawasan Wisata Bahari	28
BAB VI		KESEHATAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	29
	TABEL 6.1.	Banyaknya Penderita Penyakit.....	29
	TABEL 6.2.	Daftar Industri Penghasil Limbah B3	29
	TABEL 6.3.	Pengelolaan Sampah	30
	TABEL 6.4.	Produk Hukum Terkait Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	30
	TABEL 6.5.	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	31
	TABEL 6.6.	Jumlah Personil Menurut Tingkat Pendidikan	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat dan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana Pemerintah Pusat telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota).

Sebagai tindak lanjut terhadap kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Dompu dalam memenuhi salah satu kewajibannya menyediakan informasi lingkungan hidup dan untuk disebarluaskan kepada masyarakat, menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah yang terdiri dari :

1. Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah adalah buku yang menggambarkan status dan kecenderungan lingkungan (Komponen biofisika, ekonomi, sosial dan demografi) dalam wilayah Kabupaten Dompu.
2. Buku Kumpulan Data Lingkungan Hidup Daerah adalah merupakan data media lingkungan (air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut).

1.2 Tujuan Penulisan Laporan

Tujuan penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dompu adalah :

1. Menyediakan data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
3. Menyediakan sumber informasi data bagi rencana pembangunan tahun daerah (Repetada). Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (investor);

4. Meneyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di Daerah, serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, dan legislatif.

1.3 Visi dan Misi Kabupaten Dompu

1.3.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi harus dibawa agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi daerah adalah sebuah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu daerah. Visi selain sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi, juga menjadi acuan dan penuntun sebagai upaya yang akan dikembangkan oleh daerah yang berorientasi masa depan.

Berdasarkan potensi dan hasil analisis peluang, tantangan dan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki daerah, maka visi pembangunan Kabupaten Dompu yang tertuang dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Dompu tahun 2001 – 2005, selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah yang dimuat dan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 – 2025 adalah

***”TERWUJUDNYA MASYARAKAT DOMPU YANG SEJAHTERA DAN
RELEGIUS TAHUN 2020 DISEMANGATI OLEH NGGAHI RAWI PAHU “***

Pengertian Rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, pangan, papan, lahir dan bathin serta bebas dari kekerasan.

- b) Masyarakat yang relegius adalah masyarakat yang patuh dan taat pada ajaran agama yang dianutnya.
- c) Tahun 2020 adalah jangka waktu pencapaian visi.
- d) Nggahi Rawi Pahu adalah suatu dan Motto daerah Dompu yang bermakna “Satunya Kata dan Perbuatan “

1.3.2 Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Dompu tersebut ditempuh 8 (Delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a) **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah** adalah mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi peningkatan kesejahteraan riil masyarakat yang terus meningkat melalui upaya peningkatan penanaman modal/investasi, meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif, mewujudkan ketertarikan sistim produksi, distribusi/pemasaran, dan konsumsi masyarakat.
- b) **Meningkatkan Mutu Kehidupan Sosial Budaya**, adalah pembangunan sosial budaya untuk meningkatkan mutu kehidupan sosial budaya masyarakat mengurangi kemiskinan, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- c) **Meningkatkan Kehidupan Politik di Daerah dan Meningkatkan Supremasi Hukum**, adalah memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peranan masyarakat sipil; menjamin perkembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan

menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil;

- d) **Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat**, adalah memperkuat koordinasi dan kerjasama menciptakan kondisi keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif bagi kelangsungan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan politik; meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat di dalam mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- e) **Meningkatkan Mutu Kehidupan beragama**, adalah memperkuat jati diri yang relegius, mematuhi dan taat pada ajaran agama, aturan hukum dan tradisi budaya daerah, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, memantapkan dan menetapkan nilai-nilai luhur spiritual/moral keagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f) **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, adalah mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan IPTEK oleh masyarakat dan aparaturnya.
- g) **Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang seimbang dan Berkelanjutan**, adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan berkelanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan dimasa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi. Pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan

kehidupan, pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai potensi pembangunan.

- h) Meningkatkan Pertumbuhan Wilayah dan Pemerataan Desa dan Kota,** adalah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial sesuai dengan prioritas kebutuhan dan potensi wilayah untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan aksesibilitas wilayah, meningkatkan komitmen keberpihakan kepada kelompok masyarakat dan wilayah yang masih lemah.

1.4 Gambaran Umum Kabupaten Dompu

1.4.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 2.324,55 Km². Letak Geografis Kabupaten Dompu terletak antara 117⁰ 42' – 118⁰ 30' Bujur Timur dan 8⁰ 06' – 9⁰ 05' Lintang Selatan dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Lautan Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

Secara administratif Kabupaten Dompu sampai akhir tahun 2005 terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 58 (lima puluh delapan) Desa, 9 Kelurahan, 41 Lingkungan dan 285 Dusun, dengan luas wilayah yaitu seluas 2.324,55 km². Wilayah Kecamatan yang terluas yaitu kecamatan Pekat dengan luas 875,17 km², sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Pajo yaitu seluas 135, 32 km². Mata pencaharian penduduk Kabupaten Dompu sebagian

besar adalah bertani dengan luas lahan pertanian 15.570 ha, yang meliputi : lahan sawah beririgasi teknis seluas 7.522 ha, beririgasi setengah teknis seluas 1.980 Ha, dan sawah yang beririgasi non teknis seluas 6.068 ha. Sedangkan sebagian lainnya hidup sebagai petani peladang yang memanfaatkan lahan di lereng-lereng gunung atau bukit dengan luas lahan 216.758 Ha. (Tampilkan Peta Kabupaten Dompus).

1.4.2 Topografi

Dilihat dari aspek topografis Kabupaten Dompus, terdapat 56,784 Ha (23,43%) tanah dengan ketinggian antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut, 123,020 Ha (52,92%) berada pada ketinggian antara 100 – 500 meter di atas permukaan laut, dan 38,558 Ha (16,59%) berada pada ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan laut, serta terdapat 14,098 Ha (6,06 %) tanah berada pada ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut. Bila di lihat dari tingkat kemiringan terdapat 43.470 Ha berada pada kemiringan antara 0 – 2 %, 81.795 Ha berada pada kemiringan antara 2 – 15 % yang merupakan areal paling luas, 75.785 Ha berada pada kemiringan 15 – 40 %, dan terdapat 31.410 Ha berada pada kemiringan di atas 50 %.

Bila dilihat dari kedalaman efektif, rata-rata tanah di Kabupaten Dompus berada pada kedalaman kurang dari 30 Cm seluas 13.258 Ha berada di Wilayah Kecamatan Woja, berada pada kedalaman antara 30 - 60 Cm seluas 63.648 Ha tersebar di Kecamatan Dompus, Hu'u dan Pekat, berada pada kedalaman 60 – 90 Cm seluas 140.156 Ha tersebar di Bagian Barat Kecamatan Pekat, Timur Kecamatan Kilo, Woja dan Selatan Kecamatan Hu'u, dan terdapat 15.408 Ha tanah yang terletak di bagian Barat Kecamatan Pekat, Woja, Dompus, dan Hu'u berada pada kedalaman di atas 90 Cm.

1.4.3 Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Dompu, sebagai obyek daerah penelitian adalah sebagaimana tergambar dalam peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Nusa Tenggara Barat (Lembar, Dompu dan Bima). Adapun kondisi geologi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Endapan Permukaan

Menyebar di seluruh wilayah Kecamatan dengan luas areal ± 11.602 atau 5% dari luas wilayah. Endapan permukaan ini terdiri dari pasir, kerikil dan lempung.

2. Batuan Gunung Api

Terdiri dari hasil gunung api muda, hasil gunung api tua dan lebih tua. Tersebar di wilayah Kecamatan Pekat, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu Bagian timur. Luas areal ± 113.557 Ha atau 48,85 % dari luas wilayah Kabupaten.

3. Batu Sedimen

Batuan ini terdiri dari :

- a. Lempung tufan, tersebar di wilayah Kecamatan Pekat dengan Luas areal $\pm 1.562,5$ Ha
- b. Batuan endapan gunung api, tersebar di wilayah Kecamatan Dompu bagian timur dan Kecamatan Hu'u dengan luas areal ± 76.543 Ha
- c. Terumbu koral terangkat, tersebar di Kecamatan Dompu dan Kecamatan Kempo dengan luas areal penyebaran $\pm 1.312,5$ Ha.

Untuk jelasnya mengenai penyebaran batuan di Kabupaten Dompu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Keadaan Geologi Di Kabupaten Dompu

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Batuan Permukan	232455.00	4.99
2	Batuan Gunung Api Muda	755333.00	32.5
3	Batuan Gunung Api Lebih Tua	61230.00	26.37
4	Lempung Taufan	4587.00	1.97
5	Batuan Endapan	1562.00	0,67
6	Terumbu Korall Terangkat	76538.00	32.93
7	Terumbu Korall Terangkat	1312.00	0.57
	Jumlah Total	232455.00	100.00

*Sumber : Bappeda Kabupaten Dompu***1.4.4 VISI DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN DOMPU****Visi RTRW**

Wilayah Kabupaten Dompu di masa depan mampu tumbuh dan berkembang menjadi wilayah pusat pendukung pengembangan ekonomi wilayah Propinsi NTB bagian timur yang memiliki kedinamisan dan keberlanjutan pemanfaatan ruang untuk mencapai kemakmuran rakyat saat ini serta generasi yang akan datang.

Misi RTRW

Pemanfaatan sumber-sumber alam yang tersedia serta pemenuhan kebutuhan prasarana pendukung kegiatan ekonomi produktif dan kegiatan secara terencana dan terpadu.

Strategi Penataan Ruang Secara Regional dalam Konteks Regional

Strategi penataan ruang dalam kontek regional dilakukan dengan menetapkan sistim hirarki perkotaan. Adapun strateginya dalah :

1. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah dilakukan melalui pendekatan sistem perkotaan yang lebih ideal dan berhirarki.

2. Demi mewujudkan struktur tata ruang yang diinginkan maka harus ditunjang oleh interaksi antar wilayah dalam wujud pengembangan jaringan jalan yang memadai antara desa dengan kota kecamatan, antara kota kecamatan dengan kota kabupaten sehingga tercipta tatanan yang beruntun dan berhirarki.

Strategi Penataan Ruang dalam Konteks Lokal

Pada dasarnya penataan ruang dalam konteks lokal adalah penetapan kawasan lindung penetapan kawasan budidaya pengembangan prasarana wilayah pengembangan kawasan prioritas. Untuk memperoleh rencana tata ruang dalam konteks lokal yang diinginkan tersebut dapat diterapkan strategi antara lain sebagai berikut :

- ✍ Masing-masing kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri, namun merupakan satu kawasan pengembangan yang terencana, tertata, efisien, efektif optimal serta berkesinambungan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kemampuan daya dukung lingkungannya.
- ✍ Mengeliminir konflik antara kegiatan dan kewenangan.
- ✍ Memberikan kepastian hukum bagi pelaksana rencana.
- ✍ Pengawasan terhadap rencana yang ada dan telah berjalan.
- ✍ Evaluasi terhadap adanya deviasi akibat adanya perkembangan wilayah yang sulit diprediksikan.

1.4.5 Kependudukan

Hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) pada akhir tahun 2004, jumlah penduduk Kabupaten Dompu sebesar 199.357 jiwa yang terdiri atas laki-laki 99.778 jiwa dan perempuan 99.579 jiwa., tersebar di 8 (depalan) Kecamatan.

Komposisi penduduk Kabupaten Dompu berdasarkan hasil P4B tersebut masih didominasi usia produktif (15-64 tahun), pada usia tersebut persentase

perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Pendudukan Kabupaten Dompu usia 0-14 tahun berjumlah 75.965 (36,62 %), usia 65 tahun ke atas 9.401 (3,06%) dan usia produktif 15-64 tahun 106.363 (57,32%). Dengan demikian angka ketergantungan penduduk Kabupaten Dompu adalah 124,60 atau dengan kata lain 100 orang penduduk usia non produktif bergantung pada sekitar 125 orang usia produktif tanpa memeperhatikan jenis kelamin.

Dampak perkembangan yang telah dilakukan dapat tercermin pada indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Dompu tahun 1999 sebesar 56,2 (Peringkat 4 se-Nusa Tenggara Barat) meningkat pada tahun 2002 menjadi 56,2 (masih peringkat yang sama), dengan demikian laju IPM yang berhasil dicapai oleh Kabupaten Dompu adalah 3,91%. Apabila diukur untuk mencapai kondisi ideal yaitu 100, maka shortfaal Kabupaten Dompu cukup baik yaitu 5,02%.

Berdasarkan data tahun 2004 penduduk miskin di Kabupaten Dompu berjumlah 52.200 jiwa atau 26,49 %, pada tahun 2005 meningkat menjadi 94.510 jiwa atau 47,415 % dari jumlah penduduk.

1.4.6 Kesehatan

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diciptakan Visi Sehat Tahun 2020, yang merupakan cerminan masyarakat Kabupaten Dompu dengan ditandai oleh penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, di seluruh wilayah Kabupaten Dompu. Pembangunan kesehatan dalam kurun waktu tiga dekade ini telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun derajat kesehatan di Indonesia khususnya di Kabupaten Dompu masih

terhitung rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Rendahnya kualitas kesehatan di Kabupaten Dompu ditunjukkan beberapa kasus kesehatan sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kematian ibu

Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2005 secara langsung sebagian besar disebabkan oleh kasus pendarahan yang kontribusi mencapai 46,6%, sisanya disebabkan oleh kasus preeklampsia/eklampsia (6,7 %), partus lama (13,1 %) dan kasus lain (33,3 %).

2. Masih tingginya angka kematian bayi

Kematian bayi juga masih merupakan masalah utama di Kabupaten Dompu. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

TABEL. 1.2

JUMLAH KASUS KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2003-2005

Rincian Kasus	2003		2004		2005	
	Kasus	Mati	Kasus	Mati	Kasus	Mati
BBLR	119	30	84	11	109	18
TETANUS	1	0	1	1	2	2
NEONATORIUM ASFIXIA	69	30	21	12	44	11
INFEKSI	11	5	0	0	1	0
CACAT BAWAAN	16	8	11	9	9	5
KASUS LAIN	19	13	16	48	31	19
TOTAL	235	86	133	81	196	55

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu

3. Gizi buruk pada Balita

Pada tahun 2005 ditemukan 76 kasus marasmus, 6 kasus kwasiorkhor dan 7 kasus marasmus kwasiorkhor. Tingginya kasus gizi tersebut disebabkan oleh faktor kemiskinan, faktor perilaku dimana banyak bayi diberikan ASI yang rendah karena ditinggal bekerja oleh ibunya dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memantau status gizi anaknya.

4. ISPA dan Pneumonia pada Balita

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta penyakit lanjutannya (pneumonia) menjadi salah satu penyakit dengan kasus tertinggi di Kabupaten Dompu. Pada Tahun 2005 ditemukan kasus ISPA sebanyak 8.477 Kasus dan Pneumonia sebanyak 1.563 kasus.

5. Diare pada Balita

Diare juga masih merupakan salah satu penyakit terbanyak di Kabupaten Dompu, jumlah kasus pada balita pada tahun 2005 mencapai 2.425 kasus, sedangkan kasus seluruh (semua umur) mencapai 5.121 kasus. Tingginya kasus diare ini dipengaruhi oleh masih buruknya higiene sanitasi masyarakat, cakupan air bersih masyarakat hanya 63,40 %.

6. Malaria

Malaria merupakan penyakit endemis di Kabupaten Dompu dan kasusnya tersebar di seluruh kecamatan, jumlah kasus malaria klinis di Kabupaten Dompu yang terekam pada tahun 2005 mencapai 7.453 orang dengan Annual Malaria Incidensi (AMI) mencapai 33,9 per mil.

Rendahnya kualitas kesehatan di Kabupaten Dompu di samping disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat, faktor kemiskinan, faktor perilaku untuk hidup sehat masih rendah juga sangat dipengaruhi oleh masih kurangnya tenaga medis baik secara kuantitatif maupun secara kualitas serta kurang memadainya sarana prasarana kesehatan.

TABEL. 1.2

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Dompus Tahun 2005

No	Unit Kerja (puskesmas)	Tenaga Kesehatan							jmlh
		Medis	Perawat & Bidan	Farmasi	Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	Kemas	
1	RSU	12	51	3	2	5	0	0	73
2	Rasabou	1	14	0	2	1	1	1	20
3	Kota	3	10	0	3	1	2	0	19
4	Dotim	1	15	0	1	1	1	0	19
5	Dobar	2	22	1	1	1	2	1	30
6	Kilo	1	16	0	3	0	2	0	22
7	Kempo	1	17	0	2	1	2	1	24
8	Calabai	1	17	0	2	1	2	0	23
9	Ranggo	1	11	0	2	0	4	0	18
10	Soriutu	1	17	0	0	1	2	1	22
	Total	14	190	4	18	12	18	4	270

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus

TABEL. 1.3

JUMLAH SARANA PRASARANA DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2005

No	Fasilitas	Kepemilikan				Jumlah
		Pemkab	TNI/Polri	BUMN	Swasta	
1	Rumah Sakit Umum	1	0	0	0	1
2	Puskesmas	9	0	0	0	9
3	Puskesmas Pembantu	46	0	0	0	46
4	Puskesmas Keliling	9	0	0	0	9
5	Posyandu	291	0	0	0	291
6	Polindes	39	0	0	0	39
7	Balai Pengobatan/Klinik	0	2	0	8	10
8	Toko Obat	0	0	0	4	3
9	Apotik	0	0	0	6	6
10	Instalasi Farmasi Kes.	1	0	0	0	1
11	Praktek Dokter Perorangan	0	0	0	11	11

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus

1.4.7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1.4.7.1 Visi dan Misi RPJM Kabupaten Dompus Tahun 2006-2010

1.4.7.1.1 Visi

Dalam menjaga sinkronisasi dan kesinambungan arah penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Dompus dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Mengatur rumusan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Dompus Tahun 2006-2010 adalah merupakan visi dan misi Bupati terpilih periode 2005-2009, maka Kabupaten Dompus mempunyai visi sebagai berikut :

“Meningkatkan Gerakan Masyarakat Madani Untuk Terwujudnya Daerah Dompus yang Maju dan Modern”

Dari Visi tersebut terdapat beberapa kata kunci yaitu :

- a. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang bercirikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Demokrasi : Menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi yang mandiri sehingga memungkinkan pengawasan aktif dari masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan.
 - Kepastian Hukum : Masyarakat yang diwarnai oleh *Rule of Law* bukan kekuasaan yang sangat dominan akan tetapi hukumlah yang ditegakkan.
 - Egalitarian : Masyarakat yang mementingkan keadilan, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat bukan hanya segelintir kelompok elit untuk maju dan berkembang.
 - Penghargaan yang tinggi atas hak asasi manusia.
 - Kemajemukan budaya : Masyarakat multi etnik sekaligus multikultural.
 - Religius : Masyarakat sipil yang religius.
- b. Maju dapat diartikan bahwa kondisi Dompus 5 (lima) tahun ke depan lebih baik dari yang sudah terwujud sekarang bahkan dibandingkan dengan daerah lain di NTB.
- c. Modern adalah terwujudnya masyarakat yang memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih menguasai teknologi dalam melaksanakan setiap pekerjaan tanpa atau tidak meninggalkan tata kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan kepada budaya-budaya lokal yang hidup dan telah mentradisi dalam pergaulan bermasyarakat serta tetap berpedoman pada nilai-nilai agama.

1.4.7.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Kabupaten Dompus sebagai berikut :

“Membangun Dompus dalam artian masyarakat dan wilayah untuk meningkatkan Dompus sebagai Daerah Ibadah dengan semangat era baru menuju peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk lebih mengoperasionalkan misi tersebut maka diwujudkan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pada Aspek sumber daya manusia.
- b. Peningkatan pada Aspek sosial dan budaya.
- c. Peningkatan pada aspek fisik dan lingkungan hidup.
- d. Perbaikan dan peningkatan aspek ekonomi masyarakat.
- e. Penataan aspek sistem politik.

1.4.7.2 Prioritas Kebijakan Kabupaten Dompu

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dirumuskan maka kebijakan pembangunan daerah Dompu tercakup dalam 5 (lima) prioritas kebijakan dengan pembenahan sebagai strategi operasionalnya.

Adapun 5 (lima) prioritas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pada Aspek sumber daya manusia.
- b. Peningkatan pada Aspek sosial dan budaya.
- c. Peningkatan pada aspek fisik dan lingkungan hidup.
- d. Perbaikan dan peningkatan aspek ekonomi masyarakat.
- e. Penataan aspek sistem politik.

1. Pembenahan Aspek Sumber Daya Manusia

Pembenahan aspek SDM dalam rangka mewujudkan Dompu sebagai daerah yang maju dan modern akan relevan jika masyarakat produktif menjadi profesional di bidangnya masing-masing. Untuk lebih mengarahkan kegiatan pembenahan aspek SDM maka kebijakan yang dilakukan adalah melalui penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan pemuda dan olahraga, peranan wanita serta penghayatan nilai-nilai keagamaan agar mampu menghasilkan SDM yang lebih berkualitas adaptif dan memiliki kemampuan transformasi dan aktualisasi diri secara optimal.

Kebijakan pembangunan SDM mencakup sektor sebagai berikut :

a. Pendidikan

- Peningkatan kesadaran pengelolaan lembaga pendidikan di setiap jenjangnya.

- Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak melalui pendidikan dan pengajaran yang layak melalui sosialisasi pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikanas) 9 tahun di wilayah-wilayah terpencil, dan memaksimalkan peran serta stakeholders dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- Peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak bagi keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah (*low communities*).
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik, fasilitator, kependidikan, perpustakaan dan laboratorium, serta pengadaan sunggul.
- Pengembangan keterampilan masyarakat melalui pendidikan non formal berupa kursus dan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan minat dan bakat, serta kebutuhan belajar masyarakat dengan berorientasi pada potensi dan keunggulan lokal.

b. Kesehatan

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui upaya sebagai berikut :

- Peningkatan pembangunan kesehatan dengan paradigma Dompus sehat;
- Peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;
- Pemerataan jangkauan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan;
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
- Pengembangan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana;
- Pengembangan kemandirian masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat;
- Pengembangan metode Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk mengarahkan perilaku masyarakat;
- Pemberdayaan penduduk dan pengembangan organisasi kelembagaan.

c. Pemuda dan Olahraga

- Pembinaan Pemuda dititik beratkan pada pembinaan mental, spiritual, dan peningkatan ketrampilan, serta peningkatan terhadap kewaspadaan nasional dalam rangka menangkal Isu pengaruh dampak negatif dari pengaruh globalisasi dan informasi yang merebak dewasa ini.
- Pembinaan olahraga unggulan daerah yang memiliki potensi dan prospek kedepan guna meningkatkan Citra Kabupaten Dompu di mata daerah lain dalam bidang sumber daya keolahragaan.
- Peningkatan kesadaran generasi muda terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika, serta Miras melalui pembinaan keimanan dan ketakwan (Imtaq) yang melibatkan partisipasi aktif baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan orang tua serta pemerintah.

d. Peranan Perempuan

Isu pengaruh utama gender yang digulirkan dewasa ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Dompu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap program pembangunan yang berprespektif Gender. Untuk itu sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah yang sensitif gender, maka dikembangkan sebagai berikut :

- Peningkatan Program Kesetaraan Gender
- Peningkatan perlindungan terhadap perempuan yang mencegah terjadinya diskriminasi dan tindakan pelecehan / kekerasan.
- Peningkatan kegiatan peran perempuan baik dari pemerintah, lembaga-lembaga internasional dan LSM lainnya.

2. Pembenahan Aspek Sosial Budaya dan Keagamaan

a. Pembenahan Sosial Budaya

Arah pembangunan bidang sosial dan Budaya adalah mencakup pengembangan kelembagaan masyarakat sebagai sistem sosial budaya dengan senantiasa mengacu pada nilai-nilai lokal dengan tidak menutup diri dari kemajuan dan pembaharuan serta modernisasi juga perubahan-perubahan lingkungan strategis.

Kebijakan pembangunan sosial budaya dituangkan dalam bentuk:

- 1) Nilai budaya lokal
 - Pengamalan nilai-nilai budaya lokal untuk mewujudkan identitas daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Pengamalan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku;
 - Pemeliharaan dan pemanfaatan situs sejarah dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan daerah.
- 2) Kesenian dan Parawisata.
 - Kelestarian dan pembinaan kesenian tradisional untuk memperkaya khasanah kesenian nasional;
 - Peningkatan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dengan mengacu pada etika dan moral;
 - Pengembangan dan peningkatan usaha keparawisataan yang berbasis pada potensi dan nilai budaya untuk mendukung pembangunan daerah.

b. Agama

Arah pembangunan kehidupan keagamaan adalah pembinaan dan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, serta pengamalan nilai dan ajaran agama untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan pada setiap individu serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terbinanya kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama sehingga terwujudnya daerah Dompus sebagai daerah ibadah.

Kebijakan pembangunan agama dituangkan dalam bentuk :

- Pembinaan budaya, etika dan moral sebagai nilai universal yang dimiliki setiap agama dalam bertindak dan bertingkah laku pada seluruh lapisan masyarakat;
- Pembinaan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan sebagai bagian dari penghayatan ajaran universal dari semua agama;
- Peningkatan tugas, fungsi, dan peran tokoh institusi keagamaan dalam rangka pemeliharaan kehidupan toleransi antar umat beragama;

- Peningkatan peran serta wanita dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dalam bentuk pengajian-pengajian dan majelis ta'lim;
- Peningkatan pengetahuan dan dan pengamalan nilai-nilai agama serta budaya di setiap aspek kehidupan serta mengaktifkan pendidikan agama dan inventarisasi Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA), kelompok pengajian ibu-ibu rumah tangga, remaja, anak-anak dan pesantren;
- Memperhatikan nilai-nilai agama sebagai pijakan dalam setiap pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- Pemberdayaan ekonomi kaum dua'fa dengan mengoptimalkan mekanisme zakat melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - Lembaga pengelolaan zakat harus transparan;
 - Manfaat zakat harus dirasakan langsung oleh individu-individu sebagai subjek dan objek;
 - Pembukuan zakat harus dipisah dari infaq dan sedekah;
 - Penyaluran zakat harus dibatasi secara ketat agar zakat tidak dialokasikan untuk membantu pembangunan secara fisik, membantu penyelenggaraan kegiatan atau yang lainnya. Selain individu yang betul-betul memerlukannya.

3. Pembinaan Aspek Fisik dan Lingkungan

Upaya mewujudkan daerah Dompu sebagai daerah yang maju dan modern, maka dilakukan melalui pelaksanaan langkah dan pemberian perhatian terhadap berbagai hal sebagai berikut :

a. Penataan pengembangan fisik daerah

Penataan lingkungan hidup dan sarana fisik daerah Dompu dilakukan melalui sumbang saran secara langsung atau melalui DPRD. Dengan demikian proyeksi pembangunan daerah Dompu yang akan direalisasikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dikampanyekan dan ditawarkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk disetujui oleh masyarakat yang berdaulat, sekaligus diminta dukungannya berupa kesadaran yang mendalam akan semua konsekuensinya.

b. Konsistensi Dalam Penerapan Kebijakan Tata Ruang

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) daerah Dompu harus ditaati dan dilaksanakan secara utuh, baik oleh pemerintah maupun warga

masyarakat. Oleh karenanya ketentuan tentang RUTR harus disosialisasikan secara luas agar setiap warga masyarakat memahami dan ikut berperan aktif melaksanakan dan mengawasi penerapannya.

c. Penataan Fasilitas dan Utilitas Kota

Mengimplimentasikan rencana yang sudah menjadi komitmen masyarakat dengan menyediakan sarana fisik yang memadai antara lain : pasir, terminal angkutan dalam maupun luar daerah, penerangan jalan umum taman-taman, sarana olahraga, lapangan terbuka, Daerah aliran sungai (DAS), saluran air dan lain-lain.

d. Kerjasama Antara Daerah

Konsekuensi daerah Dompus yang merupakan daerah lintas antar Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima adalah mengalirnya arus daya, arus transportasi dan arus masyarakat di antara kedua Kabupaten tersebut mau tidak mau akan sangat berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu keharmonisan hubungan antara kedua Kabupaten tersebut haruslah terpelihara dengan baik dalam suasana kesetaraan dan saling menghargai.

e. Penataan Pola Transportasi

Pemberlakuan otonomi yang cukup luas bagi setiap Daerah Tingkat II menyebabkan kebijakan-kebijakan teknis dalam berbagai segi juga menjadi hak dan kewajiban daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi daerah Dompus yang harus diatasi dengan penerapan kebijakan sendiri. Antar lain masalah terpusatnya kendaraan / lalu lintas pada titik tertentu dan keberadaan terminal. Kondisi ini harus diatasi dengan jumlah kebijakan berikut :

- ♣ Pembatasan jumlah kendaraan dalam kota mengingat jumlah area yang terbatas dan panjang serta lebar jalan yang juga terbatas. Pembatasan jumlah kendaraan merupakan solusi jangka pendek yang akan dipertimbangkan kembali pada jangka panjang. Jika penerapan konsep berlalu lintas telah dapat bibenahi melalui standar yang ada. Namun demikian harus dipikirkan sistem pengaturan angkutan kota yang terbatas tersebut agar dapat mencakupi kebutuhan seluruh

warga masyarakat, kekurangannya diharapkan dapat dipenuhi melalui penggunaan sepeda dan menggunakan dokar serta berjalan kaki, dimana kegiatan-kegiatan tersebut telah menjadi aman, leluasa dan tetap bergengsi seperti layaknya di daerah lain.

- ♣ Pembukaan beberapa akses jalan baru untuk mempertemukan jalan-jalan besar sekaligus sebagai jalan alternatif.
- ♣ Pengurangan terkonsentrasinya arus lalu lintas kesatu titik tujuan di pusat-pusat kegiatan dan sentra-sentra ekonomi ke berbagai penjuru kota.
- ♣ Manfaatkan terminal secara optimal.
- ♣ Penyediaan rambu-rambu lalu lintas, *zebra cross* dan *traffic light* sesuai kebutuhan
- ♣ Penerapan SSA (Sistim Satu Arah)

BAB II

ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dompu, baik yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah maupun oleh pihak swasta telah meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat serta diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat dari tahun ke tahun, sehingga membawa konsekwensi dan dinamika pembangunan yaitu semakin meningkatkan aktifitas masyarakat, semakin banyak yang akan memanfaatkan sumberdaya alam, sehingga akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan ini disebabkan antara lain pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak bijaksana, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan yang berkelanjutan serta pemanfaatan yang tidak efisien dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang atau kurang memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga terjadi pemanfaatan secara tidak bijaksana dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Isu Lingkungan Hidup Utama Dapat Digambarkan Sebagai Berikut :

2.1. Ketersediaan Air Semakin Menurun

Di Wilayah Kabupaten Dompu tergolong daerah yang banyak dialiri sungai yaitu 25 sungai dan pada umumnya dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian. Akibat kondisi iklim yang kurang menguntungkan, pada musim hujan debit air cukup besar, tetapi pada musim kemarau atau musim kering menurun hingga 50 % atau sebagian besar sungai-sungai kering (tidak berair), dan debit airnya dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan rata-rata 10 % per tahun, Debit air pada sungai Baka pada tahun 1997 sebesar 2750,6 lt/dtk dan pada

tahun 2006 menjadi 1872,3 lt/dtk, debit sungai Laju tahun 1997 sebesar 1832,1 lt/dtk dan pada tahun 2006 menjadi 610,48 lt/dtk.

Di samping itu Kabupaten Dompu memiliki sumber mata air sebanyak 137 mata air yang tersebar di wilayah Kabupaten Dompu dan selain juga terdapat 9 buah bendungan irigasi/waduk, kondisinya sangat memprihatikan karena debitnya tiap tahun terus mengalami penurunan, bahkan pada musim kemarau banyak mata air yang mengalami kekeringan.

Sebagai akibat dari meningkatnya lahan kritis yang terjadi dalam kawasan hutan dan pada kawasan penyangga mata air yang disebabkan oleh peladangan liar, illegal logging dan perambahan hutan yang terjadi dalam waktu cukup lama, sehingga menyebabkan hilangnya sumber mata air, debit air sungai tiap tahun terus mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, peternakan serta kebutuhan air bersih semakin berkurang. Dimana wilayah yang sebelumnya tidak pernah mengalami kekurangan air sekarang mengalami kekeringan yang luar biasa. Berkurangnya daerah resapan air, semakin banyaknya lahan pertanian yang dialih fungsikan untuk pengembangan wilayah pemukiman, perkantoran dan sarana umum, ini menyebabkan ketersediaan air tanah tiap tahunnya mengalami pendangkalan, sehingga masyarakat yang menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih harus menggali untuk menambah kedalaman sumur.

Kekurangan air hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Dompu baik untuk kebutuhan air minum (air bersih), maupun untuk kebutuhan pertanian dan pekerbunan.

2.2. Penurunan Kualitas air

Penurunan kualitas air hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, begitupun yang terjadi di wilayah Kabupaten Dompu, namun penurunannya kualitas air tidak begitu signifikan bila dibandingkan yang terjadi di Kota-kota besar Indonesia.

Penurunan kualitas air ini pada sungai yang melintas dalam wilayah perkotaan yang ikut sungai Baka, sungai Laju, dan sungai Sorisilo, disebabkan antara lain :

1. Kebiasaan masyarakat di sekitar bantaran sungai membuang sampah, mandi dan mencuci di sungai.

Masyarakat yang ada di bantaran sungai, memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi, mencuci, membuang kotoran karena penduduk yang tinggal dibantaran sungai masih banyak yang tidak memiliki jamban dan yang lebih parah lagi sungai dijadikan tempat pembuangan sampah, sehingga banyak terdapat sampah di sungai, baik sampah organik maupun sampah an organik.

Gambar 1, Masyarakat menggunakan sungai sebagai tempat mandi



Sumber : Kantor Tamben dan LH Kabupaten Dompu Tahun 2007

2. Limbah rumah tangga, industri dan pasar yang langsung dibuang ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Gambar 2, Sungai dijadikan tempat pembuangan sampah



Sumber : Kantor Tamben dan LH Kabupaten Dompu Tahun 2007

3. Penggunaan pestisida pada lahan pertanian, dan sampah hasil pertanian yang dibuang ke sungai.
4. Adanya penambangan Bahan galian golongan C.

Gambar 3, Kegiatan Penambangan rakyat di sungai



Sumber : Kantor Tamben dan LH Kabupaten Dompu Tahun 2007

2.3. Meluasnya Lahan Kritis

Pemanfaatan sumber daya lahan dan hutan yang tidak terkendali di Kabupaten Dompu yang menyebabkan terjadinya lahan kritis yang cukup luas dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di kabupaten Dompu sampai dengan

tahun 2005 lahan sangat kritis seluas 1.690,58 ha, lahan kritis seluas 12.133,26 ha, lahan agak kritis seluas 35.648,24 ha, dan yang potensial menjadi kritis seluas 76.534.21 ha, sementara pelaksanaan reboisasi dan penghijauan pada lahan tersebut sangat terbatas dan tingkat keberhasilan pelaksanaan rehabilitas lahan tersebut sangat kecil, karena kondisi iklim cuaca atau curah hujan di Kabupaten Dompu hanya efektif 4 bulan (Januari s/d April), di samping itu kebiasaan masyarakat masih melepas ternak pada kawasan hutan.

Gambar 4, Lahan kritis sebagai akibat peladangan liar



Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu Tahun 2006

Meluasnya lahan kritis dan kerusakan hutan baik yang terjadi dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan disebabkan antara lain : Peladangan liar yang masih terjadi, perambahan hutan dan illegal logging.

Gambar 5, Peladangan berpindah-pindah (tebang bakar)



Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu Tahun 2006

Meluasnya kerusakan hutan akan membawa dampak terjadinya bahaya banjir, pada tahun 2004 terjadi bahaya banjir yang melanda Kota Dompu dan menelan kerugian yang tidak sedikit, banyaknya mata air yang hilang dan debit air semakin menurun, sehingga akan terjadi krisis air.

2.4. Penanganan persampahan dan masalah kebersihan yang belum optimal

Pengelolaan sampah pada umumnya di Kabupaten Dompu adalah dilakukan sendiri oleh masyarakat secara individual, dengan cara pembakaran, penimbunan dan membuang sendiri pada tempat tertentu yang bukan tempat sampah, hanya dalam wilayah perkotaan saja yang dilayani oleh Dinas Kimpraswil Kabupaten Dompu.

Pengelolaan persampahan khusus di wilayah perkotaan (kecamatan Dompu dan Woja), diperkirakan baru sekitar 35 % dari total produksi sampah perkotaan yang dapat dilayani oleh Dinas Kimpraswil Kabupaten Dompu, sisanya dibakar atau dibuang melalui sungai, saluran air atau got serta pada lahan terbuka. Sampah yang dihasilkan baik oleh rumah tangga, pasar, industri belum ada yang melakukan pengelolaan (kumpul, angkut dan buang di tempat sampah). Pada lokasi tempat pembuangan akhir sampah masih menggunakan sistem *open dumping* dan belum ada pengolahan, yang sewaktu-waktu dilakukan pemadatan, kalau kondisi ini terus dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi pencemaran udara, dan sebagai tempat sarangnya beberapa jenis penyakit.

Gambar 6, Lokasi TPA Bara dengan sistem openg dumping



Sumber : Kantor Tamben dan LH Kabupaten Dompu Tahun 2007

Masalah sampah dan kebersihan kota yang penanganannya belum optimal disebabkan sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya pengolahan sampah atau pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan, terbatasnya sumberdaya manusia yang menangani sampah dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah masih kurang, serta alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas teknis masih sangat kecil bila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan.

Gambar 7, Sarana Pengangkut Sampah yang tengah beroperasi



Sumber : Kantor Tamben dan LH Kabupaten Dompu Tahun 2007

2.5. Kerusakan Terumbu Karang dan Hutan Mangrove

Keberadaan hutan Mangrove di Wilayah Kabupaten Dompu terutama yang terdapat di teluk Saleh dan teluk Cempi saat ini dalam keadaan memprihatinkan. Kebanyakan Mangrove telah dialih fungsikan menjadi areal pertambakan, penebangan untuk bahan kayu pagar, bahan bangunan, pewarna jaring maupun untuk kayu bakar. Perairan Teluk Saleh dari 5 Desa yang memiliki hutan Mangrove hanya terdapat di Desa Kwangko lebih kurang seluas 10 Ha, Tolokalo 0,1 Ha dan Nanga Tumpu 12 Ha. Kondisi Mangrove yang terlihat masih utuh terdapat di Pulau Bajo dan sebagian di Dusun Kwangko diperkirakan seluas 250 Ha. Mangrove di kawasan Teluk Saleh sudah berubah fungsi dan mengalami kerusakan. Sedangkan yang ada di Teluk Cempi kerusakan Mangrove lebih disebabkan karena adanya kegiatan pertambakan terutama yang ada di desa-desa seperti Mbawi, Jambu, Bara, Riwo dan Tonda.

Kondisi Terumbu Karang juga cukup memprihatinkan, dari hasil transek terumbu karang tutupan terumbu karang hanya mencapai 20,78 % pada kedalaman 5 meter dan 35,88 % pada kedalaman 10 meter, dengan tutupan rata-rata tertinggi dari karang kategori Acropora Branching (ACB) yakni sebesar 13,8%, sedangkan Karang Massif (CM) tutupannya berkisar antara 5,5 – 6,4 %, sedangkan tutupan tertinggi dari hasil transek pada dua kedalaman adalah DCA atau tutupan Aigae yang mencapai 20,4 % pada kedalaman 5 meter dan 24 % pada kedalaman 10 meter.

Kerusakan terumbu karang ini diduga akibat dari penggunaan bom ikan oleh sebagian pencairan ikan dalam melakukan penangkapan ikan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran semua pihak dalam pengelolaan ekosistem pesisir secara bermartabat dan bertanggung jawab.

2.6. Alih fungsi Lahan

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan Ekonomi serta diiringi dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk membawa dampak pada pemanfaatan sumber daya alam khususnya lahan atau tanah yang mengalami peningkatan. Akibatnya lahan pertanian beralih fungsi menjadi permukiman masyarakat, pembangunan sarana Pemerintah (Kantor, Sekolah) dan pembangunan sarana umum (jalan raya, SPBU). Alih fungsi lahan ini terutama terjadi lahan pertanian (irigasi teknis) sehingga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang berdampak pada penurunan produksi pangan, serta berkurangnya daerah resapan air yang akan membawa dampak penurunan persediaan air tanah di musim kemarau.

Gambar 8, Lahan Pertanian yang alih fungsi sebagai sarana pendidikan



Sumber : Kantor Tamben dan LH Kabupaten Dompus Tahun 2007

2.7. Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukkannya

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga memerlukan ruang yang cukup terutama untuk pemukiman, usaha dan/atau kegiatan. Karena terbatasnya ruang ini sehingga pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Pembangunan pemukiman penduduk di wilayah bantaran sungai yang tidak memperhatikan batas minimal dari badan sungai (sempadan

sungai), sehingga badan sungai mengalami penyempitan, bila musim hujan tiba pemukiman yang terletak dibantaran sungai menjadi langganan banjir tiap tahunnya, dan banyaknya bangunan pemukiman yang tidak memperhatikan ketentuan tata ruang (sempadan jalan).

Gambar 9, Pemukiman yang tidak memperhatikan sempadan sungai



Sumber : Kantor Tamben dan LH Kabupaten Dompu Tahun 2007

2.8 Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup pada pasal 7 yaitu :

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan Kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
 - c. Menumbuhkan ketanggapan masyarakat dan segera untuk melakukan pengawasan sosial.
 - d. Memberikan saran dan pendapat.
 - e. Menyampaikan Informasi dan/atau menyampaikan Laporan.

Peran masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang di atas masih sangat rendah, sebagian besar masyarakat belum melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup atau keswadayaan masyarakat masih sangat kurang hanya menunggu apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat belum memahami hal-hal yang akan merusak lingkungan hidup. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kurangnya sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup.

BAB III

AIR

3.1. Sumber Daya Air

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alamiah keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca, ketersediaan sumber daya air pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata pada suatu wilayah dan pada setiap waktu.

Kabupaten Dompu memiliki sungai sebanyak 51 sungai, sumber mata air sebanyak 137 mata air yang tersebar di seluruh Kabupaten Dompu dan memiliki bendungan/waduk/embung sebanyak 9 buah, namun keberadaan sumber-sumber air tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Terjadinya keterbatasan atau berkurangnya sumber daya air disebabkan kerusakan lingkungan hidup yaitu **kerusakan hutan** yang disebabkan oleh ilegal logging, peladangan liar dan perambahan hutan, **berkurangnya daerah resapan air** dimana pembangunan pemukiman, gedung perkantoran pusat pertokoan dan lain-lain yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, akan tetapi pembangunan ini belum disertai dengan pembangunan sumur resapan, dalam ini Pemerintah Kabupaten Dompu ke depan harus berpikir untuk membuat kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang tata guna lahan.

3.2 Pemanfaatan sumber daya air

Seiring dengan laju perkembangan penduduk dan meningkatnya aktifitas masyarakat, kebutuhan air akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sementara ketersediaan air pada suatu wilayah semakin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya, hilangnya sebagian dari mata air, debit air semakin menurun dan terjadi penurunan permukaan air tanah, dimana setiap tahunnya masyarakat melakukan penambahan kedalaman sumurnya. Pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Dompu umumnya dipergunakan sebagai berikut :

3.2.1 Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersihpun di Kabupaten Dompu semakin meningkat sementara air yang dikelola oleh Pihak PDAM Kabupaten Dompu masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih baik kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah sambungan layanan air bersih oleh PDAM tahun 2002 sebanyak 4.989 unit meningkat menjadi 5.776 unit pada tahun 2004. Jika diasumsikan satu sambungan sama dengan satu KK maka jumlah KK yang terlayani baru 5.776 KK (12,29 %) dari 47.009 KK. Cakupan pelayanan air bersih walaupun belum sepenuhnya terpenuhi tetapi jangkauannya telah mencapai Kecamatan Manggelewa, Kempo, Hu'u Pajo, Dompu, Woja dan Pekat.

Permasalahan yang selalu dihadapi oleh masyarakat/pelanggan PDAM adalah air pendistribusian PDAM sering mengalami kemacetan pada musim kemarau dan pada saat musim hujan tiba air produksi PDAM tingkat kekeruhannya sangat tinggi mengikuti kekeruhan air baku, hal ini disebabkan oleh instalasi pengolahan air baku yang dimiliki oleh PDAM sangat sederhana.

Pemerintah Kabupaten Dompu (tahun 2006-2007) mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7,5 M untuk memperbaiki instalasi pengolahan air bersih, dengan harapan air yang diproduksi oleh PDAM mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Tabel 3.1

Jumlah Pelanggan air bersih di Kabupaten Dompu

No	Kecamatan	Tahun		
		2002	2003	2004
1	Hu'u	158	166	168
2	Pajo	124	144	151
3	Dompu	2669	2802	2899
4	Woja	1372	1803	1863
5	Kilo	-	-	-
6	Kempo	155	207	207
7	Manggelewa	278	431	453
8	Pekat	33	35	35
Jumlah		4989	5588	5776

Sumber : PDAM Kabupaten Dompu

3.2.2 Kebutuhan Air Untuk Pertanian

Kebutuhan akan air untuk irigasi, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktifitas manusia, sementara ketersediaan sumber daya air semakin menurun. Pada musim tanam tahun akhir tahun 2006, sawah pertanian masyarakat mengalami kekeringan yang disebabkan curah hujan sangat kecil, sedangkan ketersediaan air melalui irigasi teknis tidak mencukupi kebutuhan air, sehingga petani hampir mengalami gagal tanam. Untuk mengantisipasi bencana kekeringan ini Pemerintah Kabupaten Dompu mengerakkan semua komponen, Dinas/Instansi se-kabupaten Dompu untuk dapat memberikan bantuan pompa air dan pengeboran air tanah pada titik-titik tertentu. Upaya ini cukup membuahkan hasil bagi petani di wilayah Kecamatan Woja, Dompu dan pajo dapat melakukan penanaman padinya kendati waktu tanam agak terlambat yaitu pada bulan Pebruari 2007. Selain bantuan pompa dan pengeboran Pemerintah Kabupaten Dompu juga melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan bibit kepada petani secara gratis untuk membantu para petani dalam penyediaan bibit pertanian yang berkualitas dan baik.

3.3. Air Bawah Tanah

Keterbatasan pelayanan air oleh Pemerintah baik untuk kebutuhan pertanian, perkebunan maupun kebutuhan air bersih belum dapat menjangkau ke seluruh masyarakat, yang menyebabkan masyarakat harus berupaya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih tersebut masyarakat melakukan pengeboran air tanah kegiatan industri, perhotelan dan melakukan pengeboran di lokasi pertanian, karena memang air irigasi sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian dan perkebunannya.

Namun pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air belum dilakukan secara maksimal terutama pengaturan terhadap pemanfaatan air bawah tanah untuk kepentingan industri, perhotelan dan kegiatan ekonomi lainnya, kendati kewenangan pengaturan pemanfaatan air tanah ini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, karena memang instansi atau lembaga teknis yang menangani pemanfaatan air tanah di Kabupaten Dompu,

baru terbentuk pada tahun 2007 yaitu Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

3.4. Kualitas Air

Penurunan kualitas air ini terjadi di kota-kota besar di Indonesia, namun di Kabupaten Dompu penurunan kualitas air ini masih sangat kecil, kendati selama ini belum dilakukan uji laboratorium terhadap mutu air di Kabupaten Dompu, namun hasil pengamatan dan pemantauan bahwa air sungai yang berada di Kota Dompu masih banyak warga masyarakat yang menggunakannya, baik untuk cuci pakaian maupun untuk mandi. Memang dari tahun ke tahun kualitas air sungai ini terus mengalami penurunan yang disebabkan adanya aktifitas penduduk yang meningkat, seperti kegiatan industri, rumah tangga, pasar, hotel, restoran dan aktifitas lainnya. Dari aktifitas penduduk tersebut menghasilkan limbah cair yang dibuang secara langsung ke sungai dan lingkungan, di samping limbah cair ini terdapat juga sampah, baik sampah organik maupun an organik yang kerap kali sungai dijadikan tempat pembuangan sampah oleh penduduk sekitar bantaran sungai. Hasil pemantauan Bapedalda Propinsi NTB tahun 2006, dengan menggunakan parameter detergen (MBAS) pada sungai Matua DAS Raba Baka melebihi standar baku mutu (0,02 mg/l) yaitu dibagian hulu 0,03 mg/l, dibagian tengah 0,3 mg/l dan hilir 0,5 mg/l.

Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak penurunan pada tingkat kesegaran dan kejernihan air sungai, bahkan akan terjadi pencemaran terhadap air sungai, yang akan mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat yang menggunakan air sungai sebagai sumber kehidupan mereka. Untuk mengantisipasi pencemaran air sungai, maka sejak sekarang program kali bersih (Prokasi) sudah harus dilakukan dan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah dan kotoran di sungai.

BAB IV

UDARA

Lingkungan udara disebut juga dengan Atmosfer yaitu selimut campuran gas yang menyelubungi planet bumi dengan ketinggian yang mencapai sekitar 500 km. tekanan udara pada permukaan bumi 76 cm Hg dan makin ke atas makin berkurang dan akhirnya hampa.

Menurut Ibnu Golib (1994) udara berperan sebagai :

1. Sumber CO_2 yang digunakan untuk proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan menjadi senyawa karbohidrat.
2. Menjadi sumber O_2 bagi manusia dan hewan serta mikroorganisme lainnya.
3. Menampung gas N_3 yang diubah oleh bakteri nitrifikasi menjadi senyawa nitrogen.
4. Menampung molekul-molekul air (H_2O) dan tempat berlangsungnya siklus hidrologis.

Dari peranan atmosfer di atas dapat dilihat bahwa pentingnya atmosfer adalah sebagai pelindung yang sangat baik, karena dapat menyerap sinar-sinar ultra violet yang dapat merugikan kesehatan manusia. Atmosfer juga mengatur panas bumi, namun sayangnya atmosfer juga merupakan wadah tempat penampungan kontaminan dan polutan dari kegiatan manusia di bumi.

Adapun komposisi udara tanpa uap air, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Komposisi Udara di Kabupaten Dompu

Jenis Gas	% Volume
N_2	76,68
O_2	20,93
Ar	0,93
CO_2	0,03
Ne	0,0018
He	0,0005
H_2	0,001
H_2O_2	$3,5 \times 10$
O_3	2×10

kemarau, meskipun belum dilakukan penelitian terhadap dampak dari pencemaran dari kotoran kuda ini, namun kalau kondisi ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan mempengaruhi terjadinya penurunan kualitas udara juga mengganggu kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan, penyakit paru - paru, infeksi mata dan penyakit lainnya.

2. Gas buang kendaraan roda dua maupun roda empat, yang tiap tahun mengalami peningkatan, inipun akan mempengaruhi kualitas udara dan dapat menambah gas rumah kaca;
3. Pembakaran hutan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan perladangan liar, juga berpotensi mempengaruhi kondisi udara dan gas rumah kaca.

Pemerintah Kabupaten Dompu dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Menggalakkan penanaman pohon pelindung di sepanjang jalan protokol, jalan arteri dan melakukan penataan taman kota;
2. Mengatur trayek yang bisa dilalui oleh kendaraan tradisional (*benhur*), pada tempat-tempat tertentu *benhur* dilarang beroperasi;
3. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan perladangan liar, kebakaran hutan secara terpadu dan terencana dengan melibatkan unsur terkait seperti Kepolisian, Pol-Hut, Pol-PP dan Kejaksaan Negeri Dompu;
4. Pemerintah Kabupaten Dompu telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Dompu yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentang Peladangan Liar;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Kebersihan Kota, Perda ini juga mengatur tentang sarana persampahan yang harus dimiliki setiap kendaraan yang melintas di Kabupaten Dompu, baik kendaraan Tradisional (*Benhur*), roda empat (kendaraan pribadi/umum).

Grafik 3.2 Suhu Rata-rata Bulanan

BAB V

LAHAN DAN HUTAN

5.1 Lahan

5.1.1 Kondisi Umum Lahan

Luas lahan pertanian menurut data yang diterbitkan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu pada Tahun 2005 Kabupaten Dompu adalah seluas 95.329 Ha yang meliputi sawah irigasi teknis 14.903 Ha, sawah tadah hujan 4.291 Ha. Lahan kering 21.106 Ha serta lainnya 55.029 Ha dan lahan efektif yang tergarap adalah hanya 42,3% dari luas lahan pertanian yang tersedia. Hasil produksi masih memiliki nilai surplus seperti padi tahun 2005 produksi 111.744 ton sedang kebutuhan konsumsi hanya 79.103 ton.

Data menunjukkan tingkat kebutuhan lahan pertanian dalam arti luas masih tersedia dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerusakan lahan yang diakibatkan oleh upaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan melalui kaidah-kaidah pemanfaatan yang tidak dapat mendorong pembentukan lahan kritis. Saat ini di Kabupaten Dompu lahan kritis yaitu sekitar 17.756 Ha berada dalam kawasan hutan dan 17.261 Ha berada di luar kawasan hutan atau berjumlah 35.017 Ha pada tahun 2004. lahan kritis dimaksud belum memiliki kriteria yang tegas, apakah kritis produksi, kritis secara fisik atau kritis secara ekonomis.

Apresiasi tentang definisi lahan kritis masih menjadi gambaran secara makro, yaitu : kawasan hutan akibat penebangan, perladangan ataupun lahan tidur akan diasumsikan sebagai lahan kritis. Kondisi kritis lahan tentunya harus ditentukan secara berjenjang menurut pemanfaatannya, misalnya : kelas kesuburan tanah yang meliputi kondisi kimiawi tanah, kondisi fisik tanah (tekstur), jenis tanah ataupun budaya pemanfaatan.

Pada suatu wilayah dengan kelas kesuburan tanah kelas I misalnya, tetapi masyarakat hanya memanfaatkan untuk kegiatan pengembalaan ternak maka pemanfaatan lahan akan sangat tidak optimal dan sebaliknya pada masyarakat petani (padi) ternyata terdapat kondisi kelas kesuburan tanah kelas II atau kelas III bahkan kelas V maka nilai hasil panen tidak akan optimal. Maka akibat pemanfaatan yang tidak tepat akan memunculkan anggapan bahwa lahan dimaksud kritis secara ekonomi.

5.1.2 Penyebab Terjadi Kerusakan Lahan

Degradasi lahan merupakan fenomena umum yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Dompu yang disebabkan oleh berbagai faktor :

1. Faktor Biofisik antara lain :
 - a. Letak Geografi Kabupaten Dompu yang berdekatan dengan benua Australia, dimana curah hujan yang singkat (3-4 bulan) sedangkan intensitas hujan yang tinggi, diikuti oleh musim kemarau panjang (7-9 bulan)
 - b. Iklim kering yang panjang menyebabkan laju infiltrasi dan penutupan lahan (land cover) rendah dan menyebabkan tingginya laju aliran permukaan, erosi dan resiko banjir.
2. Faktor Sosial, Budaya antara lain :
 - a. Peningkatan jumlah penduduk juga mempengaruhi kerusakan lahan dimana meningkatnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, papan, maupun sandang. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut semakin banyak lahan pertanian dan semakin banyak lahan pertanian dialih fungsikan untuk pengembangan wilayah pemukiman, sarana umum (jalan, gedung sekolah dan lain-lain).
 - b. Terbatas pengetahuan dan kemampuan inovasi masyarakat.
 - c. Kemiskinan.

5.2 HUTAN

5.2.1 Kondisi Umum Hutan

Secara administratif Kabupaten Dompu sampai akhir tahun 2004 terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) Desa, 9 Kelurahan, 41 Lingkungan dan 285 Dusun, dengan luas wilayah yaitu seluas 2.324,55 km² dan terdapat 65 (enam puluh lima) Desa/Kelurahan berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang berakibat pada kerawanan pemanfaatan lahan kawasan hutan tanpa ijin.

Luas Kawasan hutan di Kabupaten Dompu adalah seluas 114.495 Ha yang terdiri dari 9 (sembilan) RTK (Register Tanah Kehutanan) dengan penyebaran Areal di sekeliling wilayah Kabupaten Dompu. Adapun pembagian wilayah hutan menurut fungsi hutan balai investarisasi dan pemetaan hutan (BIPHUT) Mataram 2001 yang terdiri dari Kawasan Produksi tetap 25.285,81

Ha, Produksi Terbatas 28.797,80 Ha, Cagar Alam 2.435.50 Ha Suaka Marga Satwa 2.254,90 Ha serta hutan Lindung 49.189,34 Ha.

Potensi sumber daya hutan Kabupaten Dompu sangat potensial dari segi keanekaragaman maupun volume. Hasil Hutan Kayu (HHK) terdiri dari sekitar 150 jenis kayu komersil yang tersebar di seluruh kawasan hutan Kabupaten Dompu, jenis Rajumas (*Duabanga mollucana*, Sp.) sesuai data produksi HPH PT. Veneer Product Indonesia yang mengelola sejak tahun 1973 sampai tahun 2003 telah memproduksi sekitar 1,2 juta meter kubik kayu. Jenis-jenis kayu yang merupakan unggulan selain rajumas di antaranya : Mengi/Suren (*Toona Sureni*), Sawo kecil (*Manilkhara Kauki*), Ipil (*Intsia Bijuga*), Rondu/bungur (*Lagerstromia*, Sp.), Sambi/Kesambi (*Scheleicera Oleosa*), Walikukun (*Schoutenia Ovata*), Loa/Ketimis dan kayu bakau (sekitar 10 species).

Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) belum dapat dimanfaatkan secara optimal, pemanfaatan baru sebatas kebutuhan masyarakat di antaranya seperti : Rotan (sekitar 10 jenis), Kayu Sepang, kayu Kuning, Kayu Manis, Madu, Bambu Hutan, Ketak (untuk bahan anyaman), dan Pandan Monyet. Investasi pengelolaan hasil hutan masih sangat kurang akibat belum dapat diinventaris potensi penyebaran maupun volume.

5.2.2 Kerusakan Hutan

Pengalaman menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan yang dilaksanakan pada masa lalu kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan yang berkelanjutan. Pemanfaatannya dilakukan secara tidak efisien dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanfaatan secara tidak terkendali yang berakibat pada kerusakan ekosistem, hidrologi dan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.

Kerusakan-kerusakan tersebut bila terus berlanjut tanpa adanya upaya-upaya perbaikan dan pengelolaan yang ditata secara sistematis dan terpadu dengan melibatkan semua *stakeholders*, maka dapat dipastikan akan terjadi degradasi secara drastis fungsi hutan dalam waktu singkat. Sejalan dengan itu kepunahan dan kelangkaan dari keanekaragaman hayati yang ada tidak dapat dihindari, sehingga pada generasi berikutnya hanya mendapat dampak negatif dari hal tersebut.

Kerusakan hutan di Kabupaten Dompu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga menyebabkan terus bertambahnya lahan kritis, baik yang terjadi dalam kawasan hutan lindung maupun pada kawasan hutan produksi. Luas lahan kritis sampai dengan tahun 2005 di Kabupaten Dompu adalah lahan sangat kritis seluas 1.690,58 ha, lahan kritis seluas 12.133,26 ha, lahan agak kritis seluas 35.648,24 ha, dan yang potensial menjadi kritis seluas 76.534.21 ha.

Pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan lain masih belum mendesak karena dapat memberikan dampak negatif terhadap percepatan rehabilitas hutan Kabupaten Dompu yang sangat membutuhkan perhatian serta pengawasan yang intensif. Tingkat kemampuan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu masih sangat terbatas dari sisi sarana prasarana ataupun pembiayaan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan dan pembinaan kawasan hutan untuk mendukung program pembangunan daerah maupun nasional.

5.2.3 Penyebab Terjadi Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Dompu yang disebabkan antara lain :

1. Peladangan liar

Sudah merupakan tradisi yang turun temurun masyarakat Kabupaten Dompu melakukan peladangan berpindah-pindah baik pada Kawasan Hutan maupun di Kawasan Hutan. Kerusakan hutan akibat peladangan liar sampai pada tahun 2005 seluas 3.352,42 Ha.

Gambar 10. Lahan yang ditinggal oleh peladangan liar Tahun 2005



Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu

2. Illegal Logging

Illegal logging masih marak terjadi di Kabupaten Dompu yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, meskipun Dinas Kehutanan dan Aparat Terkait melakukan pengawasan. Kerusakan hutan akibat Illegal Logging sampai pada tahun 2005 mencapai 1.247,42 Ha.

Gambar 11. Kayu Sitaan Oleh Dinas Kehutanan Yang Tidak Bertuah Tahun 2006



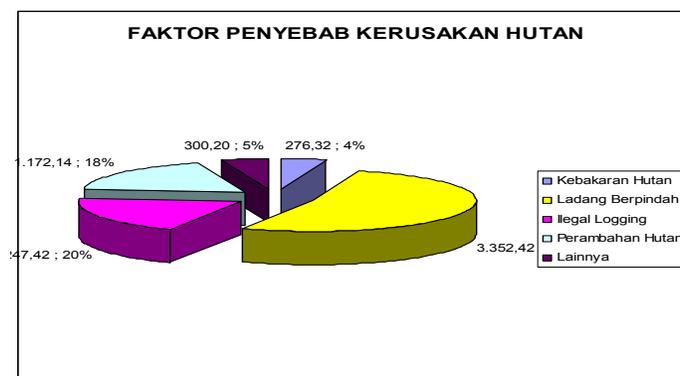
Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu

3. Kebakaran Hutan

Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Kabupaten Dompu cukup kecil dari sebab-sebab lain, karena kebakaran hutan ini dilakukan oleh peladang berpindah-pindah yang membuka lahan pertaniannya dengan sistem tebang bakar. Kerusakan hutan akibat Kebakaran Hutan sampai pada tahun 2005 seluas 276,32 Ha.

Untuk lebih jelasnya prosentase kerusakan hutan dan penyebabnya dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram, Faktor penyebab kerusakan hutan



4. Perambahan Hutan

Perambahan hutan atau dapat dikatakan sebagai pemanfaatan kawasan hutan tanpa ijin dengan melakukan kegiatan usaha pertanian menetap dan diikuti pembangunan pemukiman yang merubah fungsi terjadi di beberapa Kawasan Hutan seperti pada beberapa wilayah hutan terjadi perluasan wilayah Desa ke dalam kawasan hutan. Menurut data tahun 2005 terdapat sekitar 1.172,14 Ha dengan sebaran yang tidak merata pada setiap Kelompok Hutan.

Tekanan Sosial Ekonomi terhadap hutan akibat aksesibilitas yang tinggi serta pertumbuhan jumlah penduduk yang berimplikasi pada kebutuhan pemenuhan ekonomi sehingga mendorong perambahan hutan yang cukup signifikan.

BAB VI

KEANEKARAGAMAN HAYATI

6.1 Kondisi Umum

Kabupaten Dompus salah satu Kabupaten yang dianugerahi oleh Allah SWT dengan kekayaan alam yang berlimpah, baik yang di darat, di laut dan di udara yang merupakan salah satu modal dalam melaksanakan pembangunan. Sumberdaya alam tersebut yang di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati dan ekosistem yang tumbuh dan berkembang yang harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan makhluk lain dengan ekosistemnya.

Keanekaragaman hayati baik yang berupa flora maupun fauna tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Dompus yang di dalamnya terdapat flora dan fauna yang dilindungi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar).

Keberadaan flora dan fauna baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi, seiring masih terjadinya penebangan liar, illegal logging, perburuan satwa, perdagangan satwa liar yang dilindungi, sementara usaha untuk melestarikan flora dan fauna masih sangat kurang.

6.1.1. Flora

Secara umum flora yang terdapat di wilayah Kabupaten Dompus yang terdapat pada kawasan hutan adalah kesambi/*Schleichera oleosa*, libi/*Eugenia densiflora*, Ipil/*Intasia Omboinensis*, Sala/*Pterospermum diversifolium*, Due, Beringin/*Ficus benyamina*, Asam/*Tamarindus indica*, Walikukun/Luhu/*Schoutenia ovata*, Jambu Hutan/Monggo/*Eugenia Polyantha*, Bidara/*Zizyphus Mauritina*, sedangkan penyebaran flora yang dilindungi tidak merata di wilayah Kabupaten Dompus hanya terdapat pada daerah tertentu saja, seperti Ipil/*Intasia Omboinensis*, Sawo Kecil/*Manikara*

Kauki, Bayur/Pterocarps, Sp, Kayu Kuning/Cudrana, Sp, Kemiri/Alcuitas Moluccana, Sepang/Cacsalpinia, Beuang/Duabanga moluccana, Suren/Toona sinensis, Garu/Execearia Agallocha, Kelicung/Dyospyres macrophylla, Imba/Aza diraetha idica.

6.1.2. Fauna

Secara umum fauna yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Dompus yang terdapat kawasan hutan adalah Nuri Pipi Merah/*geoffroyus haematodus*, Tekukur biasa/*streptophelia chinensis*, Ayam Hutan Merah/*gallus gallus*, Ayam Hutan Hijau/*gallus varius*, Kekep Babi/*artamus leucorhynchus*, Babi Hutan/*sus sp.*, Rusa Timor/*cervus timorensis*, Kera Abu-Abu/*maccaca fascicularis*, Ular Hijau Ekor Merah, Ular Phytan/*phyton reticulates*, Biawak Timor/*varanus timorensis*, Bangau Tongtong/*letotiles javanicus*, Burung Gosong/*megapodius reinwardtii*, Landak/*hystrik brachyuran*.

6.2 Flora dan Fauna di Kawasan Tambora

Secara administratif, kawasan Gunung Tambora terbagi dalam 2 Kabupaten: Dompus dan Bima. Total Kawasan hutan gunung Tambora seluas $\pm 134.251,35$ ha telah ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki beranekaragam fungsi, yaitu sebagai hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman buru;

6.2.1 Flora

Berdasarkan hasil pengamatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB tahun 2007, jenis vegetasi cukup bervariasi dan kaya akan jenis terutama pada daerah-daerah yang topografinya agak datar dan bergelombang serta berada pada ketinggian di atas permukaan laut berkisar antara 200 m – 700 m. Sedangkan pada ketinggian di atas 700 m dari permukaan air laut jenis vegetasi berkurang hanya merupakan hutan sekunder yang dinominasi oleh jenis perdu dan semak, sedangkan pada ketinggian di atas 1200 m dpl hanya padang rumput/savanna yang dinominasi oleh jenis rumput alang-alang, rumput gelagah dan lantana.

Penyebaran vegetasi cukup merata pada daerah-daerah yang ketinggian 200 m - 700 m dpl, namun pada daerah-daerah tertentu masih dijumpai pertumbuhan vegetasi yang relatif sedikit, hal ini diperkirakan karena terjadinya peladangan liar, illegal logging, kegiatan perburuan satwa dan pencarian madu oleh masyarakat yang ada di sekitar kawasan.

Flora atau tumbuh-tumbuhan yang terdapat di wilayah Kabupaten Dompu khususnya di Wilayah Gunung Tambora pada kawasan suaka marga satwa yang berhasil dilakukan indentifikasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel. 6.1
Jenis Flora yang terdapat di Kawasan Suaka Marga Satwa
di Gunung Tambora tahun 2007

NO	JENIS FLORA	NAMA LATIN
1	Soka	<i>Ardisia javanica</i>
2	Kalanggo	<i>Duabanga Moluccana</i>
3	Pulai/Rida	<i>Aletonia S. Pectabilis</i>
4	Bungur/Rondu	<i>Lagestremia speciosa</i>
5	Walikukun/Luhu	<i>Schoutenia ovata</i>
6	Wangkal	<i>Albizia procera</i>
7	Kesambi/sambi	<i>Schlechera oleasa</i>
8	Linggua	<i>Pterocarpus indicus</i>
9	Asam/Mangge doro	<i>Tamarindus indica</i>
10	Jambu Hutan/Monggo	<i>Eugenia Polyantha</i>
11	Laban	<i>Vitex pubescens</i>
12	Cerme Hutan	<i>Phyllonthusacidus sheels</i>
13	Ketapang/karano	<i>Terminalia catappa</i>
14	Bidara	<i>Zizyphus Mauritinia</i>
15	Ringgi Doro/Beringin	<i>Ficus benyamina</i>
16	Tula/Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>
17	Libi	<i>Eugnia denasiflora</i>
18	Nangga	<i>Palaquium obtusifolium</i>
19	Sala/bajur	<i>Pterospermum diversifolium</i>
20	Due/beringin	<i>ficus benjamina</i>
21	Pato/Dadap	<i>Erythrina sp</i>
22	Rapu	<i>Leea sp.</i>
23	Katowi/Ampupu	<i>Eucalyptus sp.</i>
24	Mengi/Suren	<i>Toona sureni</i>
25	Rau/Dao	<i>Dracontomelon dao</i>
26	Rino	<i>Grewia koordersiana</i>
27	Heci	<i>Canarium oleosum</i>
28	Loa/Ketimis	<i>Protium javanicum</i>
29	Wau/Waru	<i>Hibiscus tiliaceus</i>
30	Cemara	<i>Casuarina junghuhniana</i>
31	Bara	<i>Tetrameles nudiflora</i>
32	Mpusu	<i>Ficus sp</i>
33	Na'a	<i>Ficus sp</i>
34	Rumput	<i>Cyperus ratundus</i>
35	Ati/Alang-alang	<i>Imperata cylindrica</i>
36	Katipu	<i>Planchonia valida</i>

37	Temba	<i>Albizzia Lebbeck</i>
38	Lantana	<i>Lantana Cemara</i>
39	Ki rinyuh	<i>Eupatorium odoratum</i>
40	Sabia/Lada Hutan	<i>Piper Sp</i>
41	Ndolo/Rumput Gelagah	
42	Silo	

Sumber Data : Balai KSDA Propinsi NTB

6.2.2. Fauna

Kawasan gunung Tambora merupakan habitat beberapa jenis fauna endemik dan sebaran terbatas, walaupun belum dilakukan penelitian tentang jumlah penyebaran fauna yang ada di gunung Tambora dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan habitatnya, hal ini disebabkan masih terjadinya peladangan liar, illegal logging, perambahan hutan di sekitar kawasan tambora sehingga mengurangi tempat berkembangbiak dan tempat bersarangnya beberapa fauna dan sering dilakukan perburuan satwa seperti Rusa, Babi Hutan, Ayam Hutan juga berpengaruh terhadap jumlah populasi dan penyebaran fauna tersebut.

Fauna yang terdapat di wilayah Kabupaten Dompu khususnya di Wilayah Gunung Tambora pada kawasan suaka marga satwa yang berhasil dilakukan indentifikasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB Tahun 2007 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel. 6.2
Jenis Fauna yang terdapat di Kawasan Suaka Marga Satwa
di Gunung Tambora tahun 2007

NO	JENIS FLORA	NAMA LATIN
I.	Aves	
1	Burung Paruh Bengkok :	
	- Kakatua Putih Kecil Jambu Kuning	<i>Cacatua Sulphurea</i>
	- Nuri Pipi Merah	<i>Geoffrayus geoffroyi</i>
	- Perkici Pelangi	<i>Trichoglossus haematodus</i>
	- Perkici Timur	<i>Trichoglossus euteles</i>
	- Elang Alap Besra	<i>Accipiter virgatus</i>
	- Elang Bondol	<i>Haliastur indus</i>
	- Elang Perut Karat	<i>Hieraaetus kieneril</i>
	- Celepuk Wallacea	<i>Otus silvicola</i>
2	Tekukur Biasa	<i>Streptopelia chinensis</i>
3	Merpati Hutan Metalik	<i>Columba vitiensis</i>
4	Dederuk Jawa	<i>Streptopelia bitorquata</i>
5	Pergam Punggung Hitam	<i>Ducula lacermulata</i>

6	Punai Gagak	<i>Treron sphenura</i>
7	Wiwik Uncuing	<i>Cacomantis sepulclaris</i>
8	Raja Udang Erasias	<i>Alcedo atthis</i>
9	Kiciut Batu	<i>Motacilla cinerica</i>
10	Kiciut Kerbau	<i>Motacilla flava</i>
11	Srigunting Wallancea	<i>Dicrurus densus</i>
12	Kepudang Kuduk Hitam	<i>Oriolus chinensis</i>
13	Gelatik Batu Belabu	<i>Parus major</i>
14	Anis Nusa Tenggara	<i>Zoothera dohertyi</i>
15	Anis Kembang	<i>Zoothera interpres</i>
16	Ceret Gunung	<i>Cettia vulcania</i>
17	Cikrak Daun	<i>Phylloscopus trivirgatus</i>
18	Kacamata Wallancea	<i>Zosterops wallacei</i>
19	Kacamata Biasa	<i>Zosterops palpebrosus</i>
20	Kacamata Laut	<i>Zosterops chloris</i>
21	Opor Flores	<i>Lophozosterops</i>
22	Sikatan Rimba Ayun	<i>superciliaris</i>
23	Sikatan Bodoh	<i>Rhinomyias oscillans</i>
24	Sikatan Dada Merah	<i>Ficedula hyperytra</i>
25	Seriwang Asia	<i>Ficedula dumetoria</i>
26	Kahicap Flores	<i>Tersiphone paradise</i>
27	Kahicap Kacamata	<i>Monarcha sacerdotum</i>
28	Sikatan Paruh Lebar	<i>Monarcha trivirgatus</i>
29	Kipasan Flores	<i>Myiagra ruficollis</i>
30	Kancilan Flores	<i>Rhipidura diluta</i>
31	Kekep Babi	<i>Pachycephalla</i>
32	Tiong Emas	<i>Artamus leucorhynchus</i>
33	Cikukua Tanduk	<i>Gracula religiosa</i>
34	Isap Madu Topi Sisik	<i>Philemon buceroides</i>
35	Burung Madu Sriganti	<i>Lichmera lombokia</i>
36	Burung Madu Mentari	<i>Nectarinia jugularis</i>
37	Cabai Dahi Hitam	<i>Nectarinia solaris</i>
38	Cabai Gunung	<i>Dicaeum igniferum</i>
39	Cabai Lombok	<i>Dicaeum sanguinolentum</i>
40	Sepah Kerdil	<i>Dicaeum maugei</i>
41	Sepah Hutan	<i>Pericrocotus lansbergei</i>
42	Ayam Hutan Merah	<i>Pericrocotus flammeus</i>
43	Ayam Hutan Hijau	<i>Gallus gallus</i> <i>Gallus varius</i>
II	Mamalia	
1	Babi Hutan	
2	Rusa Timor	<i>Sus Sp</i>
3	Kera Abu-abu	<i>Cervus timorensis</i> <i>Maccaca Fascicu ;aris</i>
III	Reptil	
1	Ular Hijau Ekor Merah	
2	Ular Phyton	
3	Biawak Timor	<i>Phyton reticulates</i> <i>Varanus timorensis</i>

Sumber Data : Balai KSDA Propinsi NTB

6.3 Flora dan Fauna di Taman Wisata Alam Pulau Satonda

Pulau Satonda, sebuah pulau Vulkanik yang terletak di Laut Flores, 3 Km dari semenanjung Sanggar atau 30 Km dari Gunung Tambora yang berada di daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif Pemerinatahan berada di Wilayah Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, secara geografis terletak pada 8° 05' 53"- 8° 07' 15" Lintang Selatan dan 117° 43' 59" - 117° 45' 27" Bujur Timur.

Mengacu pada Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 7 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom pada pasal 2 ayat (4) serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai KSDA, penyelenggaraan pengelolaan TWA Pulau Satonda dan Perairan di sekitarnya dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam NTB dan Konservasi Alam. Berdasarkan wilayah pemangkuan kawasan TWA Pulau Satonda dan Perairan di sekitarnya berada di bawah pengelolaan Seksi Konsevasi Wilayah II Bima, Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB.

6.3.1 Kondisi Flora

Secara umum tipe vegetasi di Taman Wisata Alam Satonda adalah Hutan Panati dan Tropis daratan rendah, dengan jenis antara lain Asam/tamarindus indica, Kalibuda/excoecaria agallocha, Ketimis/protium javanicum, Berora/kleinhovia hospita, Kesambi/schleicera oleosa, Bidara, Kayu Batu, Kayu Daru, Kayu Jawa, Beringin/ficus sp, Tempawe, Bambu/bambusa sp. Sedangkan vegetasi pantai seperti Nyamplung/calophyllum inophyllum, Waru Laut/hibiscus sp. dan Pandan Laut/pandanus tectorius.

6.3.2 Kondisi Fauna

Beragam-macam jenis satwa dapat ditemui di Kawasan TWA Satonda, Satwa dari kelas Mamalia yang dapat ditemui antara lain Rusa (Cervus Timorensis), Babi Hutan (Sus scrova), Kera Ekor panjang (Macacafascicularis), Landak (Hystrix Javanica) dan Kelelawar. Jenis-jenis Satwa dari kelas Reptilia yang dapat ditemui antara lain Biawak (Varanus Sp), Ular Piton (Phyton Sp). Sedangkan jenis-jenis burung yang dapat

ditemui antara lain Burung Gosong (*Megapodius reinwardtii*), Kepondang, Pergan, Bangau Putih/Abu Kecil, Itik Air, Burung Raja Udang dan Tekukur.

Berdasarkan hasil inventasi potensi flora di Taman Wisata Alam Pulau Santonda yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB tahun 2006, adalah sebagai berikut :

Tabel. 6.3
Jenis Flora yang terdapat Di Taman Wisata Alam
Pulau Santonda Tahun 2006

No.	Nama Jenis	Nama Latin
1.	Rida	-
2.	Kirinyu Golkar	<i>Opatorium Odoratum</i>
3.	Feli	<i>Streblus asper</i>
4.	Ndaru	-
5.	Cito	-
6.	Songga	-
7.	Bambu	<i>Bambusa Vulgaris</i>
8.	Mbesi	-
9.	Silo / Tanjung	<i>Mimosops Elengi</i>
10.	Kara	-
11.	Rino / Tolah	<i>Grewia Koodersiana</i>
12.	Tula / Pulai	<i>Alstonia Scholaris</i>
13.	Loka	<i>Pittospermum Ferugenium</i>
14.	Jarak	<i>Jatropha Curcas</i>
15.	Arunana / Kayu Api	<i>Dyospiros Sp.</i>
16.	Wamba	-
17.	Loak / Ketimis	<i>Protium Javanicum</i>
18.	Sarea / Saraa	<i>Zyzyphus Celtidifolia</i>
19.	Sambi / Kesambi	<i>Schleicera oleosa</i>
20.	Ndao	-
21.	Mposu	<i>Ficus sp</i>
22.	Edu	-
23.	Kedondong	<i>Spondias Pinata</i>
24.	Katanga	-
25.	Asam	<i>Tamarindus Indicus</i>
26.	Rangga	-
27.	Ira	-
28.	Bidara	<i>Zyzyphus Numularia</i>
29.	Kalibuda	<i>Exoecaria Agallocha.</i>
30.	Ringi Doro	<i>Gosampinus Malabarica.</i>
31.	Rondu / Bungur	<i>Lagerstroemia Speciosa</i>

Sumber Data : Balai KSDA Propinsi NTB

sebagian besar tertutup semak belukar dan daerah belakang (*hinterlan*) berupa perbukitan yang bergelombang.

Material penyusunnya merupakan hasil dari proses erosi di bukit-bukit dan pegunungan, karena banyak ditemukan material-material yang sama antara daerah pantai dengan daerah perbukitan, dengan jenis yang bervariasi antara kekerangan kecil dan berpasir. Material pasir pantai berwarna kecoklatan berukuran halus hingga sedang. Di daerah belakang pantai material berupa pasir yang telah berakumulasi dengan tanah alluvial kelabu dan coklat yang penyebarannya pada bentuk lahan dataran pantai dan perbukitan. Sedangkan daerah depan pantai umumnya berpasir dan berkarang lunak dengan kemiringan dasar laut yang curam. Contoh bentuk pesisir pantai di beberapa Teluk di Kabupaten Dompu dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 13, Kondisi beberapa morfologi pantai wilayah pesisir dan laut, Kabupaten Dompu NTB.



Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu

7.1.2. Kondisi Oseanografi

7.1.2.1. Gelombang

Tinggi gelombang lebih besar pada periode musim barat dibandingkan dengan periode musim timur. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,5 m - 1,0 m, dengan gelombang tertinggi pada musim barat yang mencapai 1,5 m.

7.1.2.2. Pasang Surut (Pasut)

Tipe Pasut di perairan pesisir dan laut Kabupaten Dompu berbeda-beda. Contohnya di Teluk Cempi Kabupaten Dompu adalah: Tipe Pasut Campuran cenderung Harian Ganda (*Mixed Semi Diurnal*)

7.1.2.3. Arus

Kondisi arus di wilayah pesisir dan laut secara umum sebagai berikut: Kecepatan arus maksimum adalah sebesar 0,34 knot dengan arah 60° (arus pasang) dan tercatat 0,22 knot dengan arah 225° (arus surut). Dari perhitungan arus pasang surut diketahui bahwa kecepatan maksimum arus pada waktu air menuju pasang sebesar 0,30 knot dengan arah 54°. Sedangkan pada waktu surut sebesar 0,26 knot dengan arah 234°. Untuk kecepatan arus non pasang (arus tetap) sebesar 0,06 knot dengan arah berkisar 87°-152°.

7.1.2.4. Batimetri Perairan Pesisir dan Laut

Perairan pesisir dan laut (Teluk) memiliki kedalaman secara umum landai mulai dari muara sungai di bagian hulu teluk hingga radius 5 kilometer. Kedalaman berkisar antara 0 – 5 meter. Pada radius 5 - 10 kilometer, kedalaman ke tiga Teluk berkisar antara 5 – 10 meter, dan mulai radius 10 hingga menuju mulut teluk, kedalaman perairan semakin dalam dengan kisaran antara 10 hingga 100 meter.

7.2. Kondisi Hutan Mangrove

Luas hutan yang berada di Kabupaten Dompu adalah seluas 1.432,57 Ha. Kawasan hutan mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perairan teluk. Wilayah yang didominasi oleh Hutan Mangrove di Kabupaten

Dompu adalah di wilayah Pesisir dan Laut Teluk Cempi. Wilayah Teluk Cempi mempunyai beberapa muara sungai, salah satunya adalah sungai Mendunga, muara sungai ini merupakan jalur nelayan untuk mencari ikan, udang dan rajungan sekitar pantai. Muara sungai mempunyai jarak sekitar 7 km sampai bibir pantai, pasang surut tertinggi terendahnya mencapai 2 m dan lebar sungai sekitar 10 m.

Secara umum keadaan ekologis hutan mangrove Teluk Cempi relatif masih alami walaupun ada sedikit kerusakan akibat aktivitas penduduk untuk kebutuhan kayu bakar dan ada beberapa lokasi yang telah mengalami konversi lahan menjadi tambak udang. Vegetasi dominan yang tumbuh sepanjang hutan mangrove adalah jenis *Avicennia* sp. dan *Rhizophora* Sp. Keberadaan hutan mangrove menjadi hal yang sangat penting bagi siklus ekologi dan rantai makanan.

Usaha reboisasi oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu melalui program Gerakan Nasional Reboisasi Hutan dan Lahan yang bekerjasama dengan LSM PLAN telah melakukan penanaman bibit mangrove seluas 8 Ha, dengan metoda silvikultur dan parit sekitar tambak serta penanaman di muara sungai. Namun hasil pengamatan ternyata metode silvikultur dan parit di areal pertambakan lebih berhasil dari pada penanaman di muara sungai (< 10%).

Hutan mangrove memiliki dua aspek yang cukup strategis baik secara ekologis maupun ekonomis. Potensi ekologis lebih ditekankan pada kemampuan hutan mangrove untuk mendukung eksistensi lingkungan, sebagai hutan air asin, penahan angin, penahan gempuran ombak, pengendali banjir dan tempat persembunyian, mencari makan dan daerah asuhan dari berbagai macam binatang, sehingga sulit dinilai dengan uang. Sedangkan potensi ekonomi ditunjukkan dengan kemampuan hutan mangrove dalam menyediakan produk yang dapat diukur dengan uang, seperti kayu.

Selanjutnya, ekosistem mangrove memiliki sejumlah fungsi dan manfaat penting, seperti: (i) sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur, dan perangkap sedimen; (ii) penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon mangrove; (iii) daerah asuhan, daerah mencari makanan dan daerah pemijahan berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya; (iv) penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku

arang, dan bahan baku kertas (pulp); (v) pemasok larva ikan, udang dan biota laut lainnya; (vi) sebagai tempat wisata.

Peran kritis dari ekosistem mangrove berkaitan dengan tingginya laju produktivitas primer mereka. Biomassa bahan organik yang berasal dari akar dan daun membentuk jaring makanan yang kompleks, meliputi berbagai jenis hewan yang tidak bertulang belakang seperti krustasea dan moluska, ikan, mamalia, reptil dan burung. Sejumlah jenis udang ekonomis penting seperti *Penaeus monodon* dan *P. indiem* berasosiasi dengan mangrove selama stadia tertentu dalam siklus hidupnya. Siklus hidup dari udang (*Penaeus tnerguiemis*) erat sekali berasosiasi dengan mangrove. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang erat antara total area hutan mangrove dan hasil tangkapan udang ekonomis di lepas pantai. Hubungan yang positif tersebut mungkin disebabkan: (i) mangrove merupakan sumber penting dari detritus dan nutrien yang merupakan sumber bahan bakar dalam jaringan rantai makanan di dekat pantai; dan (ii) mangrove berperan sebagai daerah asuhan dan daerah mencari makanan bagi beberapa jenis biota laut. Selain udang, sumberdaya perikanan yang terdapat di Teluk Cempi adalah ikan pelagik kecil yang cukup potensial.

Dari beberapa uraian tentang kondisi wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Dompu, maka dapat disimpulkan beberapa kondisi nyata yang terjadi antara lain :

1. Terjadi Kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir dan laut Teluk Cempi secara besar-besaran.
2. Terjadi kerusakan terumbu karang.

7.3 Penyebab Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Dompu

7.3.1. Kerusakan Hutan Mangrove

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan mangrove secara tak terkendali selama ini, antara lain sebagai berikut :

1. Karena ketidaktahuan kita tentang arti dan peran penting mangrove bagi kehidupan, termasuk manusia.
2. Kurangnya penguasaan kita tentang teknik-teknik pengelolaan mangrove yang ramah lingkungan.
3. Penebangan mangrove untuk kayu bakar/arang.
4. Penebangan mangrove untuk kayu bangunan.

5. Penebangan mangrove untuk pagar halaman dan kebun.

7.3.2. Kerusakan Terumbu Karang

Di wilayah Kabupaten Dompu, ada beberapa penyebab kerusakan terumbu karang, antara lain :

1. Kerusakan terumbu karang akibat pengeboman. Kegiatan pengeboman dimaksudkan untuk dapat menangkap ikan dengan cara yang cepat. Kegiatan ini dilakukan karena umumnya masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang manfaat dan arti penting dari keberadaan terumbu karang.
2. Kerusakan terumbu karang dengan cara potasium. Kasus yang terjadi di Dompu adalah kegiatan potasium dimaksudkan untuk menangkap Lobster (udang barong) dan ikan hias pada daerah terumbu karang.

7.3.2. Dampak Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut

7.3.2.1. Kerusakan Hutan Mangrove

Dampak dari kerusakan hutan mangrove yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat Dompu adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan berkurangnya hutan mangrove dari hari ke hari, maka akan mengurangi media peredam/penghalang gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen. Karena sadar atau tidak, bahwa hutan mangrove dapat berfungsi sebagai peredam gelombang atau LANO MPANGA (istilah lokal) atau pasang tinggi yang menghantui para petambak di Kabupaten Dompu.
- 2) Berkurangnya fungsi hutan mangrove sebagai penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon mangrove.
- 3) Berkurangnya fungsi hutan mangrove sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makanan (*feeding ground*) dan daerah pemijahan (*spawning ground*) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya. Pada dekade awal tahun 90-an, Kabupaten Dompu terkenal dengan kualitas Induk Udangnya, dan bahkan tercatat nomor dua setelah daerah Aceh. Kondisi

sekarang, ada kecenderungan menurun kualitas induk udangnya seiring dengan semakin berkurangnya hutan mangrove.

- 4) Berkurangnya fungsi hutan mangrove sebagai pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya.

7.3.2.2. Kerusakan Terumbu Karang

Dampak dari kerusakan terumbu karang, antara lain :

1. Rusaknya daerah asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makanan (*feeding ground*) dan daerah pemijahan (*spawning ground*) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya.
2. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan.
3. Daerah penangkapan ikan akan semakin jauh dari pantai.

BAB VIII

AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa ***pengelolaan lingkungan hidup*** adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pembangunan yang akan dilakukan di wilayah Kabupaten Dompu diharapkan terus memperhatikan fungsi lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Dompu yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Dompu Yang Sejahtera Dan Religius Tahun 2020 Disemangati Oleh Ngahi Rahi Pahu"***.

Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan metode S-P-R (State-Pressure, Respon) terhadap isu lingkungan hidup di Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya air semakin berkurang;
2. Penurunan Kualitas air sungai;
3. Meluasnya lahan kritis;
4. Pengelolaan sampah dan kebersihan yang belum optimal;
5. Kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove;
6. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, sarana umum dan jalan;
7. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Dompu ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM), dengan memperhatikan beberapa program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJM Nasional dan RPJM Propinsi NTB sepanjang ada kaitan dengan potensi dan rencana pembangunan Kabupaten Dompu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Kabupaten Dompu Tahun 2005-2010 disusun dengan memperoleh masukan dari RENSTRA-SKPD masing-masing instansi se-Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Bendungan dan Jaringan Irigasi.
 - ♣ Pembangunan Bendungan/Embung dan Jaringan Irigasi Baru
 - ♣ Rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi
2. Program pengembangan potensi air tanah
 - ♣ Pembuatan Sumur Pompa Dalam;
3. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - ♣ Normalisasi air sungai
 - ♣ Pengelolaan Kali bersih
 - ♣ Pemantauan Kualitas Air Sungai
4. Program Pengendalian dan pengawasan Hutan
 - ♣ Pemberantasan pencurian kayu hutan dan perdagangan kayu illegal;
 - ♣ Pengawasan pengelolaan hutan
5. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - ♣ Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - ♣ Pembibitan Bakti Sosial
6. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya Alam;
 - ♣ Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya air
 - ♣ Pengendalian Kerusakan hutan dan Lahan
 - ♣ Pantai dan Laut Lestari
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
 - ♣ Pengurangan timbunan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumber sampahnya
 - ♣ Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra dalam pengelolaan
 - ♣ Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem persampahan
 - Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan Kabupaten
 - Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran
 - Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan
 - Mengembangkan TPA ke arah Control landfill.
 - ♣ Pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah
 - Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara stakeholder
 - ♣ Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

- Menyasakan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan
 - Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan
8. Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- ♣ Pengelolaan dan Rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuari dan teluk.
 - ♣ Pengendalian Dan Pengawasan Kerusakan Hutan Mangrove.
 - ♣ Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
 - ♣ Penyuluhan dan sosialisasi pengelolaan lingkungan
9. Program Pengendalian dan Pemanfaatan ruang
- ♣ Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - ♣ Penyusunan Rencana Tata Ruang berdasarkan hirarki/tingkatan produk perencanaan sehingga tercapai out put perencanaan
 - ♣ Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat
 - ♣ Penyusunan evaluasi perencanaan untuk mengetahui tingkat penyimpangan terhadap rancangan tata ruang yang ada.
 - ♣ Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
10. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- ♣ Pemberdayaan ekonomi masyarakat pinggir kawasan hutan
 - ♣ Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir pantai
 - ♣ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
11. Program Penyusun Kebijakan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat dan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana Pemerintah Pusat telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota).

Sebagai tindak lanjut terhadap kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Dompu dalam memenuhi salah satu kewajibannya menyediakan informasi lingkungan hidup dan untuk disebarluaskan kepada masyarakat, menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah yang terdiri dari :

1. Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah adalah buku yang menggambarkan status dan kecenderungan lingkungan (Komponen biofisika, ekonomi, sosial dan demografi) dalam wilayah Kabupaten Dompu.
2. Buku Kumpulan Data Lingkungan Hidup Daerah adalah merupakan data media lingkungan (air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut).

1.2 Tujuan Penulisan Laporan

Tujuan penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dompu adalah :

1. Menyediakan data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
3. Menyediakan sumber informasi data bagi rencana pembangunan tahun daerah (Repetada). Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (investor);

4. Meneyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di Daerah, serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, dan legislatif.

1.3 Visi dan Misi Kabupaten Dompu

1.3.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi harus dibawa agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi daerah adalah sebuah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu daerah. Visi selain sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi, juga menjadi acuan dan penuntun sebagai upaya yang akan dikembangkan oleh daerah yang berorientasi masa depan.

Berdasarkan potensi dan hasil analisis peluang, tantangan dan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki daerah, maka visi pembangunan Kabupaten Dompu yang tertuang dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Dompu tahun 2001 – 2005, selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah yang dimuat dan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 – 2025 adalah

***”TERWUJUDNYA MASYARAKAT DOMPU YANG SEJAHTERA DAN
RELEGIUS TAHUN 2020 DISEMANGATI OLEH NGGAHI RAWI PAHU “***

Pengertian Rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, pangan, papan, lahir dan bathin serta bebas dari kekerasan.

- b) Masyarakat yang relegius adalah masyarakat yang patuh dan taat pada ajaran agama yang dianutnya.
- c) Tahun 2020 adalah jangka waktu pencapaian visi.
- d) Nggahi Rawi Pahu adalah suatu dan Motto daerah Dompu yang bermakna “Satunya Kata dan Perbuatan “

1.3.2 Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Dompu tersebut ditempuh 8 (Delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a) **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah** adalah mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi peningkatan kesejahteraan riil masyarakat yang terus meningkat melalui upaya peningkatan penanaman modal/investasi, meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif, mewujudkan ketertarikan sistim produksi, distribusi/pemasaran, dan konsumsi masyarakat.
- b) **Meningkatkan Mutu Kehidupan Sosial Budaya**, adalah pembangunan sosial budaya untuk meningkatkan mutu kehidupan sosial budaya masyarakat mengurangi kemiskinan, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- c) **Meningkatkan Kehidupan Politik di Daerah dan Meningkatkan Supremasi Hukum**, adalah memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peranan masyarakat sipil; menjamin perkembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan

menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil;

- d) Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat,** adalah memperkuat koordinasi dan kerjasama menciptakan kondisi keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif bagi kelangsungan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan politik; meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat di dalam mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- e) Meningkatkan Mutu Kehidupan beragama,** adalah memperkuat jati diri yang relegius, mematuhi dan taat pada ajaran agama, aturan hukum dan tradisi budaya daerah, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, memantapkan dan menetapkan nilai-nilai luhur spiritual/moral keagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia,** adalah mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan IPTEK oleh masyarakat dan aparaturnya.
- g) Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang seimbang dan Berkelanjutan,** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan berkelanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan dimasa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi. Pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan

kehidupan, pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai potensi pembangunan.

- h) Meningkatkan Pertumbuhan Wilayah dan Pemerataan Desa dan Kota,** adalah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial sesuai dengan prioritas kebutuhan dan potensi wilayah untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan aksesibilitas wilayah, meningkatkan komitmen keberpihakan kepada kelompok masyarakat dan wilayah yang masih lemah.

1.4 Gambaran Umum Kabupaten Dompu

1.4.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 2.324,55 Km². Letak Geografis Kabupaten Dompu terletak antara 117⁰ 42' – 118⁰ 30' Bujur Timur dan 8⁰ 06' – 9⁰ 05' Lintang Selatan dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Lautan Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

Secara administratif Kabupaten Dompu sampai akhir tahun 2005 terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 58 (lima puluh delapan) Desa, 9 Kelurahan, 41 Lingkungan dan 285 Dusun, dengan luas wilayah yaitu seluas 2.324,55 km². Wilayah Kecamatan yang terluas yaitu kecamatan Pekat dengan luas 875,17 km², sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Pajo yaitu seluas 135, 32 km². Mata pencaharian penduduk Kabupaten Dompu sebagian

besar adalah bertani dengan luas lahan pertanian 15.570 ha, yang meliputi : lahan sawah beririgasi teknis seluas 7.522 ha, beririgasi setengah teknis seluas 1.980 Ha, dan sawah yang beririgasi non teknis seluas 6.068 ha. Sedangkan sebagian lainnya hidup sebagai petani peladang yang memanfaatkan lahan di lereng-lereng gunung atau bukit dengan luas lahan 216.758 Ha. (Tampilkan Peta Kabupaten Dompu).

1.4.2 Topografi

Dilihat dari aspek topografis Kabupaten Dompu, terdapat 56,784 Ha (23,43%) tanah dengan ketinggian antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut, 123,020 Ha (52,92%) berada pada ketinggian antara 100 – 500 meter di atas permukaan laut, dan 38,558 Ha (16,59%) berada pada ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan laut, serta terdapat 14,098 Ha (6,06 %) tanah berada pada ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut. Bila di lihat dari tingkat kemiringan terdapat 43.470 Ha berada pada kemiringan antara 0 – 2 %, 81.795 Ha berada pada kemiringan antara 2 – 15 % yang merupakan areal paling luas, 75.785 Ha berada pada kemiringan 15 – 40 %, dan terdapat 31.410 Ha berada pada kemiringan di atas 50 %.

Bila dilihat dari kedalaman efektif, rata-rata tanah di Kabupaten Dompu berada pada kedalaman kurang dari 30 Cm seluas 13.258 Ha berada di Wilayah Kecamatan Woja, berada pada kedalaman antara 30 - 60 Cm seluas 63.648 Ha tersebar di Kecamatan Dompu, Hu'u dan Pekat, berada pada kedalaman 60 – 90 Cm seluas 140.156 Ha tersebar di Bagian Barat Kecamatan Pekat, Timur Kecamatan Kilo, Woja dan Selatan Kecamatan Hu'u, dan terdapat 15.408 Ha tanah yang terletak di bagian Barat Kecamatan Pekat, Woja, Dompu, dan Hu'u berada pada kedalaman di atas 90 Cm.

1.4.3 Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Dompu, sebagai obyek daerah penelitian adalah sebagaimana tergambar dalam peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Nusa Tenggara Barat (Lembar, Dompu dan Bima). Adapun kondisi geologi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Endapan Permukaan

Menyebar di seluruh wilayah Kecamatan dengan luas areal ± 11.602 atau 5% dari luas wilayah. Endapan permukaan ini terdiri dari pasir, kerikil dan lempung.

2. Batuan Gunung Api

Terdiri dari hasil gunung api muda, hasil gunung api tua dan lebih tua. Tersebar di wilayah Kecamatan Pekat, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu Bagian timur. Luas areal ± 113.557 Ha atau 48,85 % dari luas wilayah Kabupaten.

3. Batu Sedimen

Batuan ini terdiri dari :

- a. Lempung tufan, tersebar di wilayah Kecamatan Pekat dengan Luas areal $\pm 1.562,5$ Ha
- b. Batuan endapan gunung api, tersebar di wilayah Kecamatan Dompu bagian timur dan Kecamatan Hu'u dengan luas areal ± 76.543 Ha
- c. Terumbu koral terangkat, tersebar di Kecamatan Dompu dan Kecamatan Kempo dengan luas areal penyebaran $\pm 1.312,5$ Ha.

Untuk jelasnya mengenai penyebaran batuan di Kabupaten Dompu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Keadaan Geologi Di Kabupaten Dompu

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Batuan Permukan	232455.00	4.99
2	Batuan Gunung Api Muda	755333.00	32.5
3	Batuan Gunung Api Lebih Tua	61230.00	26.37
4	Lempung Taufan	4587.00	1.97
5	Batuan Endapan	1562.00	0,67
6	Terumbu Koral Terangkat	76538.00	32.93
7	Terumbu Koral Terangkat	1312.00	0.57
	Jumlah Total	232455.00	100.00

Sumber : Bappeda Kabupaten Dompu

1.4.4 VISI DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN DOMPU

Visi RTRW

Wilayah Kabupaten Dompu di masa depan mampu tumbuh dan berkembang menjadi wilayah pusat pendukung pengembangan ekonomi wilayah Propinsi NTB bagian timur yang memiliki kedinamisan dan keberlanjutan pemanfaatan ruang untuk mencapai kemakmuran rakyat saat ini serta generasi yang akan datang.

Misi RTRW

Pemanfaatan sumber-sumber alam yang tersedia serta pemenuhan kebutuhan prasarana pendukung kegiatan ekonomi produktif dan kegiatan secara terencana dan terpadu.

Strategi Penataan Ruang Secara Regional dalam Konteks Regional

Strategi penataan ruang dalam kontek regional dilakukan dengan menetapkan sistim hirarki perkotaan. Adapun strateginya dalah :

1. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah dilakukan melalui pendekatan sistem perkotaan yang lebih ideal dan berhirarki.

2. Demi mewujudkan struktur tata ruang yang diinginkan maka harus ditunjang oleh interaksi antar wilayah dalam wujud pengembangan jaringan jalan yang memadai antara desa dengan kota kecamatan, antara kota kecamatan dengan kota kabupaten sehingga tercipta tatanan yang beruntun dan berhirarki.

Strategi Penataan Ruang dalam Konteks Lokal

Pada dasarnya penataan ruang dalam konteks lokal adalah penetapan kawasan lindung penetapan kawasan budidaya pengembangan prasarana wilayah pengembangan kawasan prioritas. Untuk memperoleh rencana tata ruang dalam konteks lokal yang diinginkan tersebut dapat diterapkan strategi antara lain sebagai berikut :

- ✍ Masing-masing kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri, namun merupakan satu kawasan pengembangan yang terencana, tertata, efisien, efektif optimal serta berkesinambungan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kemampuan daya dukung lingkungannya.
- ✍ Mengeliminir konflik antara kegiatan dan kewenangan.
- ✍ Memberikan kepastian hukum bagi pelaksana rencana.
- ✍ Pengawasan terhadap rencana yang ada dan telah berjalan.
- ✍ Evaluasi terhadap adanya deviasi akibat adanya perkembangan wilayah yang sulit diprediksikan.

1.4.5 Kependudukan

Hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) pada akhir tahun 2004, jumlah penduduk Kabupaten Dompu sebesar 199.357 jiwa yang terdiri atas laki-laki 99.778 jiwa dan perempuan 99.579 jiwa., tersebar di 8 (depalan) Kecamatan.

Komposisi penduduk Kabupaten Dompu berdasarkan hasil P4B tersebut masih didominasi usia produktif (15-64 tahun), pada usia tersebut persentase

perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Pendudukan Kabupaten Dompu usia 0-14 tahun berjumlah 75.965 (36,62 %), usia 65 tahun ke atas 9.401 (3,06%) dan usia produktif 15-64 tahun 106.363 (57,32%). Dengan demikian angka ketergantungan penduduk Kabupaten Dompu adalah 124,60 atau dengan kata lain 100 orang penduduk usia non produktif bergantung pada sekitar 125 orang usia produktif tanpa memeperhatikan jenis kelamin.

Dampak perkembangan yang telah dilakukan dapat tercermin pada indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Dompu tahun 1999 sebesar 56,2 (Peringkat 4 se-Nusa Tenggara Barat) meningkat pada tahun 2002 menjadi 56,2 (masih peringkat yang sama), dengan demikian laju IPM yang berhasil dicapai oleh Kabupaten Dompu adalah 3,91%. Apabila diukur untuk mencapai kondisi ideal yaitu 100, maka shortfaal Kabupaten Dompu cukup baik yaitu 5,02%.

Berdasarkan data tahun 2004 penduduk miskin di Kabupaten Dompu berjumlah 52.200 jiwa atau 26,49 %, pada tahun 2005 meningkat menjadi 94.510 jiwa atau 47,415 % dari jumlah penduduk.

1.4.6 Kesehatan

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diciptakan Visi Sehat Tahun 2020, yang merupakan cerminan masyarakat Kabupaten Dompu dengan ditandai oleh penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, di seluruh wilayah Kabupaten Dompu. Pembangunan kesehatan dalam kurun waktu tiga dekade ini telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun derajat kesehatan di Indonesia khususnya di Kabupaten Dompu masih

terhitung rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Rendahnya kualitas kesehatan di Kabupaten Dompu ditunjukkan beberapa kasus kesehatan sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kematian ibu

Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2005 secara langsung sebagian besar disebabkan oleh kasus pendarahan yang kontribusi mencapai 46,6%, sisanya disebabkan oleh kasus preeklampsia/eklampsia (6,7 %), partus lama (13,1 %) dan kasus lain (33,3 %).

2. Masih tingginya angka kematian bayi

Kematian bayi juga masih merupakan masalah utama di Kabupaten Dompu. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

TABEL. 1.2

JUMLAH KASUS KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2003-2005

Rincian Kasus	2003		2004		2005	
	Kasus	Mati	Kasus	Mati	Kasus	Mati
BBLR	119	30	84	11	109	18
TETANUS	1	0	1	1	2	2
NEONATORIUM ASFIXIA	69	30	21	12	44	11
INFEKSI	11	5	0	0	1	0
CACAT BAWAAN	16	8	11	9	9	5
KASUS LAIN	19	13	16	48	31	19
TOTAL	235	86	133	81	196	55

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu

3. Gizi buruk pada Balita

Pada tahun 2005 ditemukan 76 kasus marasmus, 6 kasus kwasiorkhor dan 7 kasus marasmus kwasiorkhor. Tingginya kasus gizi tersebut disebabkan oleh faktor kemiskinan, faktor perilaku dimana banyak bayi diberikan ASI yang rendah karena ditinggal bekerja oleh ibunya dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memantau status gizi anaknya.

4. ISPA dan Pneumonia pada Balita

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta penyakit lanjutannya (pneumonia) menjadi salah satu penyakit dengan kasus tertinggi di Kabupaten Dompu. Pada Tahun 2005 ditemukan kasus ISPA sebanyak 8.477 Kasus dan Pneumonia sebanyak 1.563 kasus.

5. Diare pada Balita

Diare juga masih merupakan salah satu penyakit terbanyak di Kabupaten Dompu, jumlah kasus pada balita pada tahun 2005 mencapai 2.425 kasus, sedangkan kasus seluruh (semua umur) mencapai 5.121 kasus. Tingginya kasus diare ini dipengaruhi oleh masih buruknya higiene sanitasi masyarakat, cakupan air bersih masyarakat hanya 63,40 %.

6. Malaria

Malaria merupakan penyakit endemis di Kabupaten Dompu dan kasusnya tersebar di seluruh kecamatan, jumlah kasus malaria klinis di Kabupaten Dompu yang terekam pada tahun 2005 mencapai 7.453 orang dengan Annual Malaria Incidensi (AMI) mencapai 33,9 per mil.

Rendahnya kualitas kesehatan di Kabupaten Dompu di samping disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat, faktor kemiskinan, faktor perilaku untuk hidup sehat masih rendah juga sangat dipengaruhi oleh masih kurangnya tenaga medis baik secara kuantitatif maupun secara kualitas serta kurang memadainya sarana prasarana kesehatan.

TABEL. 1.2

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Dompu Tahun 2005

No	Unit Kerja (puskesmas)	Tenaga Kesehatan							jmlh
		Medis	Perawat & Bidan	Farmasi	Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	Kesmas	
1	RSU	12	51	3	2	5	0	0	73
2	Rasabou	1	14	0	2	1	1	1	20
3	Kota	3	10	0	3	1	2	0	19
4	Dotim	1	15	0	1	1	1	0	19
5	Dobar	2	22	1	1	1	2	1	30
6	Kilo	1	16	0	3	0	2	0	22
7	Kempo	1	17	0	2	1	2	1	24
8	Calabai	1	17	0	2	1	2	0	23
9	Ranggo	1	11	0	2	0	4	0	18
10	Soriutu	1	17	0	0	1	2	1	22
	Total	14	190	4	18	12	18	4	270

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu

TABEL. 1.3

JUMLAH SARANA PRASARANA DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2005

No	Fasilitas	Kepemilikan				Jumlah
		Pemkab	TNI/Polri	BUMN	Swasta	
1	Rumah Sakit Umum	1	0	0	0	1
2	Puskesmas	9	0	0	0	9
3	Puskesmas Pembantu	46	0	0	0	46
4	Puskesmas Keliling	9	0	0	0	9
5	Posyandu	291	0	0	0	291
6	Polindes	39	0	0	0	39
7	Balai Pengobatan/Klinik	0	2	0	8	10
8	Toko Obat	0	0	0	4	3
9	Apotik	0	0	0	6	6
10	Instalasi Farmasi Kes.	1	0	0	0	1
11	Praktek Dokter Perorangan	0	0	0	11	11

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu

1.4.7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1.4.7.1 Visi dan Misi RPJM Kabupaten Dompu Tahun 2006-2010

1.4.7.1.1 Visi

Dalam menjaga sinkronisasi dan kesinambungan arah penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Dompu dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Mengatur rumusan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Dompu Tahun 2006-2010 adalah merupakan visi dan misi Bupati terpilih periode 2005-2009, maka Kabupaten Dompu mempunyai visi sebagai berikut :

“Meningkatkan Gerakan Masyarakat Madani Untuk Terwujudnya Daerah Dompus yang Maju dan Modern”

Dari Visi tersebut terdapat beberapa kata kunci yaitu :

- a. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang bercirikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Demokrasi : Menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi yang mandiri sehingga memungkinkan pengawasan aktif dari masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan.
 - Kepastian Hukum : Masyarakat yang diwarnai oleh *Rule of Law* bukan kekuasaan yang sangat dominan akan tetapi hukumlah yang ditegakkan.
 - Egalitarian : Masyarakat yang mementingkan keadilan, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat bukan hanya segelintir kelompok elit untuk maju dan berkembang.
 - Penghargaan yang tinggi atas hak asasi manusia.
 - Kemajemukan budaya : Masyarakat multi etnik sekaligus multikultural.
 - Religius : Masyarakat sipil yang religius.
- b. Maju dapat diartikan bahwa kondisi Dompus 5 (lima) tahun ke depan lebih baik dari yang sudah terwujud sekarang bahkan dibandingkan dengan daerah lain di NTB.
- c. Modern adalah terwujudnya masyarakat yang memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih menguasai teknologi dalam melaksanakan setiap pekerjaan tanpa atau tidak meninggalkan tata kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan kepada budaya-budaya lokal yang hidup dan telah mentradisi dalam pergaulan bermasyarakat serta tetap berpedoman pada nilai-nilai agama.

1.4.7.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Kabupaten Dompus sebagai berikut :

“Membangun Dompus dalam artian masyarakat dan wilayah untuk meningkatkan Dompus sebagai Daerah Ibadah dengan semangat era baru menuju peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk lebih mengoperasionalkan misi tersebut maka diwujudkan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pada Aspek sumber daya manusia.
- b. Peningkatan pada Aspek sosial dan budaya.
- c. Peningkatan pada aspek fisik dan lingkungan hidup.
- d. Perbaikan dan peningkatan aspek ekonomi masyarakat.
- e. Penataan aspek sistem politik.

1.4.7.2 Prioritas Kebijakan Kabupaten Dompu

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dirumuskan maka kebijakan pembangunan daerah Dompu tercakup dalam 5 (lima) prioritas kebijakan dengan pembenahan sebagai strategi operasionalnya.

Adapun 5 (lima) prioritas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pada Aspek sumber daya manusia.
- b. Peningkatan pada Aspek sosial dan budaya.
- c. Peningkatan pada aspek fisik dan lingkungan hidup.
- d. Perbaikan dan peningkatan aspek ekonomi masyarakat.
- e. Penataan aspek sistem politik.

1. Pembenahan Aspek Sumber Daya Manusia

Pembenahan aspek SDM dalam rangka mewujudkan Dompu sebagai daerah yang maju dan modern akan relevan jika masyarakat produktif menjadi profesional di bidangnya masing-masing. Untuk lebih mengarahkan kegiatan pembenahan aspek SDM maka kebijakan yang dilakukan adalah melalui penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan pemuda dan olahraga, peranan wanita serta penghayatan nilai-nilai keagamaan agar mampu menghasilkan SDM yang lebih berkualitas adaptif dan memiliki kemampuan transformasi dan aktualisasi diri secara optimal.

Kebijakan pembangunan SDM mencakup sektor sebagai berikut :

a. Pendidikan

- Peningkatan kesadaran pengelolaan lembaga pendidikan di setiap jenjangnya.

- Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak melalui pendidikan dan pengajaran yang layak melalui sosialisasi pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikanas) 9 tahun di wilayah-wilayah terpencil, dan memaksimalkan peran serta stakeholders dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- Peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak bagi keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah (*low communities*).
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik, fasilitator, kependidikan, perpustakaan dan laboratorium, serta pengadaan sunggul.
- Pengembangan keterampilan masyarakat melalui pendidikan non formal berupa kursus dan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan minat dan bakat, serta kebutuhan belajar masyarakat dengan berorientasi pada potensi dan keungulan lokal.

b. Kesehatan

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui upaya sebagai berikut :

- Peningkatan pembangunan kesehatan dengan paradigma Dompus sehat;
- Peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;
- Pemerataan jangkauan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan;
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
- Pengembangan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana;
- Pengembangan kemandirian masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat;
- Pengembangan metode Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk mengarahkan perilaku masyarakat;
- Pemberdayaan penduduk dan pengembangan organisasi kelembagaan.

c. Pemuda dan Olahraga

- Pembinaan Pemuda dititik beratkan pada pembinaan mental, spiritual, dan peningkatan ketrampilan, serta peningkatan terhadap kewaspadaan nasional dalam rangka menangkal Isu pengaruh dampak negatif dari pengaruh globalisasi dan informasi yang merebak dewasa ini.
- Pembinaan olahraga unggulan daerah yang memiliki potensi dan prospek kedepan guna meningkatkan Citra Kabupaten Dompu di mata daerah lain dalam bidang sumber daya keolahragaan.
- Peningkatan kesadaran generasi muda terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika, serta Miras melalui pembinaan keimanan dan ketakwan (Imtaq) yang melibatkan partisipasi aktif baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan orang tua serta pemerintah.

d. Peranan Perempuan

Isu pengaruh utama gender yang digulirkan dewasa ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Dompu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap program pembangunan yang berprespektif Gender. Untuk itu sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah yang sensitif gender, maka dikembangkan sebagai berikut :

- Peningkatan Program Kesetaraan Gender
- Peningkatan perlindungan terhadap perempuan yang mencegah terjadinya diskriminasi dan tindakan pelecehan / kekerasan.
- Peningkatan kegiatan peran perempuan baik dari pemerintah, lembaga-lembaga internasional dan LSM lainnya.

2. Pembenahan Aspek Sosial Budaya dan Keagamaan

a. Pembenahan Sosial Budaya

Arah pembangunan bidang sosial dan Budaya adalah mencakup pengembangan kelembagaan masyarakat sebagai sistem sosial budaya dengan senantiasa mengacu pada nilai-nilai lokal dengan tidak menutup diri dari kemajuan dan pembaharuan serta modernisasi juga perubahan-perubahan lingkungan strategis.

Kebijakan pembangunan sosial budaya dituangkan dalam bentuk:

1) Nilai budaya lokal

- Pengamalan nilai-nilai budaya lokal untuk mewujudkan identitas daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pengamalan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku;
- Pemeliharaan dan pemanfaatan situs sejarah dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan daerah.

2) Kesenian dan Parawisata.

- Kelestarian dan pembinaan kesenian tradisional untuk memperkaya khasanah kesenian nasional;
- Peningkatan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dengan mengacu pada etika dan moral;
- Pengembangan dan peningkatan usaha keparawisataan yang berbasis pada potensi dan nilai budaya untuk mendukung pembangunan daerah.

b. Agama

Arah pembangunan kehidupan keagamaan adalah pembinaan dan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, serta pengamalan nilai dan ajaran agama untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan pada setiap individu serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terbinanya kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama sehingga terwujudnya daerah Dompu sebagai daerah ibadah.

Kebijakan pembangunan agama dituangkan dalam bentuk :

- Pembinaan budaya, etika dan moral sebagai nilai universal yang dimiliki setiap agama dalam bertindak dan bertingkah laku pada seluruh lapisan masyarakat;
- Pembinaan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan sebagai bagian dari penghayatan ajaran universal dari semua agama;
- Peningkatan tugas, fungsi, dan peran tokoh institusi keagamaan dalam rangka pemeliharaan kehidupan toleransi antar umat beragama;

- Peningkatan peran serta wanita dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dalam bentuk pengajian-pengajian dan majelis ta'lim;
- Peningkatan pengetahuan dan dan pengamalan nilai-nilai agama serta budaya di setiap aspek kehidupan serta mengaktifkan pendidikan agama dan inventarisasi Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA), kelompok pengajian ibu-ibu rumah tangga, remaja, anak-anak dan pesantren;
- Memperhatikan nilai-nilai agama sebagai pijakan dalam setiap pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- Pemberdayaan ekonomi kaum dua'fa dengan mengoptimalkan mekanisme zakat melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - Lembaga pengelolaan zakat harus transparan;
 - Manfaat zakat harus dirasakan langsung oleh individu-individu sebagai subjek dan objek;
 - Pembukuan zakat harus dipisah dari infaq dan sedekah;
 - Penyaluran zakat harus dibatasi secara ketat agar zakat tidak dialokasikan untuk membantu pembangunan secara fisik, membantu penyelenggaraan kegiatan atau yang lainnya. Selain individu yang betul-betul memerlukannya.

3. Pembinaan Aspek Fisik dan Lingkungan

Upaya mewujudkan daerah Dompu sebagai daerah yang maju dan modern, maka dilakukan melalui pelaksanaan langkah dan pemberian perhatian terhadap berbagai hal sebagai berikut :

a. Penataan pengembangan fisik daerah

Penataan lingkungan hidup dan sarana fisik daerah Dompu dilakukan melalui sumbang saran secara langsung atau melalui DPRD. Dengan demikian proyeksi pembangunan daerah Dompu yang akan direalisasikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dikampanyekan dan ditawarkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk disetujui oleh masyarakat yang berdaulat, sekaligus diminta dukungannya berupa kesadaran yang mendalam akan semua konsekuensinya.

b. Konsistensi Dalam Penerapan Kebijakan Tata Ruang

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) daerah Dompu harus ditaati dan dilaksanakan secara utuh, baik oleh pemerintah maupun warga

masyarakat. Oleh karenanya ketentuan tentang RUTR harus disosialisasikan secara luas agar setiap warga masyarakat memahami dan ikut berperan aktif melaksanakan dan mengawasi penerapannya.

c. Penataan Fasilitas dan Utilitas Kota

Mengimplimentasikan rencana yang sudah menjadi komitmen masyarakat dengan menyediakan sarana fisik yang memadai antara lain : pasir, terminal angkutan dalam maupun luar daerah, penerangan jalan umum taman-taman, sarana olahraga, lapangan terbuka, Daerah aliran sungai (DAS), saluran air dan lain-lain.

d. Kerjasama Antara Daerah

Konsekuensi daerah Dompus yang merupakan daerah lintas antar Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima adalah mengalirnya arus daya, arus transportasi dan arus masyarakat di antara kedua Kabupaten tersebut mau tidak mau akan sangat berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu keharmonisan hubungan antara kedua Kabupaten tersebut haruslah terpelihara dengan baik dalam suasana kesetaraan dan saling menghargai.

e. Penataan Pola Transportasi

Pemberlakuan otonomi yang cukup luas bagi setiap Daerah Tingkat II menyebabkan kebijakan-kebijakan teknis dalam berbagai segi juga menjadi hak dan kewajiban daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi daerah Dompus yang harus diatasi dengan penerapan kebijakan sendiri. Antar lain masalah terpusatnya kendaraan / lalu lintas pada titik tertentu dan keberadaan terminal. Kondisi ini harus diatasi dengan jumlah kebijakan berikut :

- ♣ Pembatasan jumlah kendaraan dalam kota mengingat jumlah area yang terbatas dan panjang serta lebar jalan yang juga terbatas. Pembatasan jumlah kendaraan merupakan solusi jangka pendek yang akan dipertimbangkan kembali pada jangka panjang. Jika penerapan konsep berlalu lintas telah dapat bibenahi melalui standar yang ada. Namun demikian harus dipikirkan sistem pengaturan angkutan kota yang terbatas tersebut agar dapat mencakupi kebutuhan seluruh

warga masyarakat, kekurangannya diharapkan dapat dipenuhi melalui penggunaan sepeda dan menggunakan dokar serta berjalan kaki, dimana kegiatan-kegiatan tersebut telah menjadi aman, leluasa dan tetap bergengsi seperti layaknya di daerah lain.

- ♣ Pembukaan beberapa akses jalan baru untuk mempertemukan jalan-jalan besar sekaligus sebagai jalan alternatif.
- ♣ Pengurangan terkonsentrasinya arus lalu lintas kesatu titik tujuan di pusat-pusat kegiatan dan sentra-sentra ekonomi ke berbagai penjuru kota.
- ♣ Manfaatkan terminal secara optimal.
- ♣ Penyediaan rambu-rambu lalu lintas, *zebra cross* dan *traffic light* sesuai kebutuhan
- ♣ Penerapan SSA (Sistim Satu Arah)

BAB II

ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dompu, baik yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah maupun oleh pihak swasta telah meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat serta diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat dari tahun ke tahun, sehingga membawa konsekwensi dan dinamika pembangunan yaitu semakin meningkatkan aktifitas masyarakat, semakin banyak yang akan memanfaatkan sumberdaya alam, sehingga akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan ini disebabkan antara lain pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak bijaksana, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan yang berkelanjutan serta pemanfaatan yang tidak efisien dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang atau kurang memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga terjadi pemanfaatan secara tidak bijaksana dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Isu Lingkungan Hidup Utama Dapat Digambarkan Sebagai Berikut :

2.1. Ketersediaan Air Semakin Menurun

Di Wilayah Kabupaten Dompu tergolong daerah yang banyak dialiri sungai yaitu 25 sungai dan pada umumnya dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian. Akibat kondisi iklim yang kurang menguntungkan, pada musim hujan debit air cukup besar, tetapi pada musim kemarau atau musim kering menurun hingga 50 % atau sebagian besar sungai-sungai kering (tidak berair), dan debit airnya dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan rata-rata 10 % per tahun, Debit air pada sungai Baka pada tahun 1997 sebesar 2750,6 lt/dtk dan pada

tahun 2006 menjadi 1872,3 lt/dtk, debit sungai Laju tahun 1997 sebesar 1832,1 lt/dtk dan pada tahun 2006 menjadi 610,48 lt/dtk.

Di samping itu Kabupaten Dompu memiliki sumber mata air sebanyak 137 mata air yang tersebar di wilayah Kabupaten Dompu dan selain juga terdapat 9 buah bendungan irigasi/waduk, kondisinya sangat memprihatikan karena debitnya tiap tahun terus mengalami penurunan, bahkan pada musim kemarau banyak mata air yang mengalami kekeringan.

Sebagai akibat dari meningkatnya lahan kritis yang terjadi dalam kawasan hutan dan pada kawasan penyangga mata air yang disebabkan oleh peladangan liar, illegal logging dan perambahan hutan yang terjadi dalam waktu cukup lama, sehingga menyebabkan hilangnya sumber mata air, debit air sungai tiap tahun terus mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, peternakan serta kebutuhan air bersih semakin berkurang. Dimana wilayah yang sebelumnya tidak pernah mengalami kekurangan air sekarang mengalami kekeringan yang luar biasa. Berkurangnya daerah resapan air, semakin banyaknya lahan pertanian yang dialih fungsikan untuk pengembangan wilayah pemukiman, perkantoran dan sarana umum, ini menyebabkan ketersediaan air tanah tiap tahunnya mengalami pendangkalan, sehingga masyarakat yang menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih harus menggali untuk menambah kedalaman sumur.

Kekurangan air hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Dompu baik untuk kebutuhan air minum (air bersih), maupun untuk kebutuhan pertanian dan pekerbunan.







Meluasnya kerusakan hutan akan membawa dampak terjadinya bahaya banjir, pada tahun 2004 terjadi bahaya banjir yang melanda Kota Dompu dan menelan kerugian yang tidak sedikit, banyaknya mata air yang hilang dan debit air semakin menurun, sehingga akan terjadi krisis air.

2.4. Penanganan persampahan dan masalah kebersihan yang belum optimal

Pengelolaan sampah pada umumnya di Kabupaten Dompu adalah dilakukan sendiri oleh masyarakat secara individual, dengan cara pembakaran, penimbunan dan membuang sendiri pada tempat tertentu yang bukan tempat sampah, hanya dalam wilayah perkotaan saja yang dilayani oleh Dinas Kimpraswil Kabupaten Dompu.

Pengelolaan persampahan khusus di wilayah perkotaan (kecamatan Dompu dan Woja), diperkirakan baru sekitar 35 % dari total produksi sampah perkotaan yang dapat dilayani oleh Dinas Kimpraswil Kabupaten Dompu, sisanya dibakar atau dibuang melalui sungai, saluran air atau got serta pada lahan terbuka. Sampah yang dihasilkan baik oleh rumah tangga, pasar, industri belum ada yang melakukan pengelolaan (kumpul, angkut dan buang di tempat sampah). Pada lokasi tempat pembuangan akhir sampah masih menggunakan sistem *open dumping* dan belum ada pengolahan, yang sewaktu-waktu dilakukan pemadatan, kalau kondisi ini terus dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi pencemaran udara, dan sebagai tempat sarangnya beberapa jenis penyakit.



2.5. Kerusakan Terumbu Karang dan Hutan Mangrove

Keberadaan hutan Mangrove di Wilayah Kabupaten Dompu terutama yang terdapat di teluk Saleh dan teluk Cempi saat ini dalam keadaan memprihatinkan. Kebanyakan Mangrove telah dialih fungsikan menjadi areal pertambakan, penebangan untuk bahan kayu pagar, bahan bangunan, pewarna jaring maupun untuk kayu bakar. Perairan Teluk Saleh dari 5 Desa yang memiliki hutan Mangrove hanya terdapat di Desa Kwangko lebih kurang seluas 10 Ha, Tolokalo 0,1 Ha dan Nanga Tumpu 12 Ha. Kondisi Mangrove yang terlihat masih utuh terdapat di Pulau Bajo dan sebagian di Dusun Kwangko diperkirakan seluas 250 Ha. Mangrove di kawasan Teluk Saleh sudah berubah fungsi dan mengalami kerusakan. Sedangkan yang ada di Teluk Cempi kerusakan Mangrove lebih disebabkan karena adanya kegiatan pertambakan terutama yang ada di desa-desa seperti Mbawi, Jambu, Bara, Riwo dan Tonda.

Kondisi Terumbu Karang juga cukup memprihatinkan, dari hasil transek terumbu karang tutupan terumbu karang hanya mencapai 20,78 % pada kedalaman 5 meter dan 35,88 % pada kedalaman 10 meter, dengan tutupan rata-rata tertinggi dari karang kategori Acropora Branching (ACB) yakni sebesar 13,8%, sedangkan Karang Massif (CM) tutupannya berkisar antara 5,5 – 6,4 %, sedangkan tutupan tertinggi dari hasil transek pada dua kedalaman adalah DCA atau tutupan Aigae yang mencapai 20,4 % pada kedalaman 5 meter dan 24 % pada kedalaman 10 meter.

Kerusakan terumbu karang ini diduga akibat dari penggunaan bom ikan oleh sebagian pencairan ikan dalam melakukan penangkapan ikan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran semua pihak dalam pengelolaan ekosistem pesisir secara bermartabat dan bertanggung jawab.





Peran masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang di atas masih sangat rendah, sebagian besar masyarakat belum melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup atau keswadayaan masyarakat masih sangat kurang hanya menunggu apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat belum memahami hal-hal yang akan merusak lingkungan hidup. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kurangnya sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup.

BAB III

AIR

3.1. Sumber Daya Air

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alamiah keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca, ketersediaan sumber daya air pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata pada suatu wilayah dan pada setiap waktu.

Kabupaten Dompu memiliki sungai sebanyak 51 sungai, sumber mata air sebanyak 137 mata air yang tersebar di seluruh Kabupaten Dompu dan memiliki bendungan/waduk/embung sebanyak 9 buah, namun keberadaan sumber-sumber air tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Terjadinya keterbatasan atau berkurangnya sumber daya air disebabkan kerusakan lingkungan hidup yaitu **kerusakan hutan** yang disebabkan oleh ilegal logging, peladangan liar dan perambahan hutan, **berkurangnya daerah resapan air** dimana pembangunan pemukiman, gedung perkantoran pusat pertokoan dan lain-lain yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, akan tetapi pembangunan ini belum disertai dengan pembangunan sumur resapan, dalam ini Pemerintah Kabupaten Dompu ke depan harus berpikir untuk membuat kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang tata guna lahan.

3.2 Pemanfaatan sumber daya air

Seiring dengan laju perkembangan penduduk dan meningkatnya aktifitas masyarakat, kebutuhan air akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sementara ketersediaan air pada suatu wilayah semakin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya, hilangnya sebagian dari mata air, debit air semakin menurun dan terjadi penurunan permukaan air tanah, dimana setiap tahunnya masyarakat melakukan penambahan kedalaman sumurnya. Pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Dompu umumnya dipergunakan sebagai berikut :

3.2.1 Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersihpun di Kabupaten Dompu semakin meningkat sementara air yang dikelola oleh Pihak PDAM Kabupaten Dompu masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih baik kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah sambungan layanan air bersih oleh PDAM tahun 2002 sebanyak 4.989 unit meningkat menjadi 5.776 unit pada tahun 2004. Jika diasumsikan satu sambungan sama dengan satu KK maka jumlah KK yang terlayani baru 5.776 KK (12,29 %) dari 47.009 KK. Cakupan pelayanan air bersih walaupun belum sepenuhnya terpenuhi tetapi jangkauannya telah mencapai Kecamatan Manggelewa, Kempo, Hu'u Pajo, Dompu, Woja dan Pekat.

Permasalahan yang selalu dihadapi oleh masyarakat/pelanggan PDAM adalah air pendistribusian PDAM sering mengalami kemacetan pada musim kemarau dan pada saat musim hujan tiba air produksi PDAM tingkat kekeruhannya sangat tinggi mengikuti kekeruhan air baku, hal ini disebabkan oleh instalasi pengolahan air baku yang dimiliki oleh PDAM sangat sederhana.

Pemerintah Kabupaten Dompu (tahun 2006-2007) mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7,5 M untuk memperbaiki instalasi pengolahan air bersih, dengan harapan air yang diproduksi oleh PDAM mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Tabel 3.1

Jumlah Pelanggan air bersih di Kabupaten Dompu

No	Kecamatan	Tahun		
		2002	2003	2004
1	Hu'u	158	166	168
2	Pajo	124	144	151
3	Dompu	2669	2802	2899
4	Woja	1372	1803	1863
5	Kilo	-	-	-
6	Kempo	155	207	207
7	Manggelewa	278	431	453
8	Pekat	33	35	35
Jumlah		4989	5588	5776

Sumber : PDAM Kabupaten Dompu

3.2.2 Kebutuhan Air Untuk Pertanian

Kebutuhan akan air untuk irigasi, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktifitas manusia, sementara ketersediaan sumber daya air semakin menurun. Pada musim tanam tahun akhir tahun 2006, sawah pertanian masyarakat mengalami kekeringan yang disebabkan curah hujan sangat kecil, sedangkan ketersediaan air melalui irigasi teknis tidak mencukupi kebutuhan air, sehingga petani hampir mengalami gagal tanam. Untuk mengantisipasi bencana kekeringan ini Pemerintah Kabupaten Dompu mengerakkan semua komponen, Dinas/Instansi se-kabupaten Dompu untuk dapat memberikan bantuan pompa air dan pengeboran air tanah pada titik-titik tertentu. Upaya ini cukup membuahkan hasil bagi petani di wilayah Kecamatan Woja, Dompu dan pajo dapat melakukan penanaman padinya kendati waktu tanam agak terlambat yaitu pada bulan Pebruari 2007. Selain bantuan pompa dan pengeboran Pemerintah Kabupaten Dompu juga melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan bibit kepada petani secara gratis untuk membantu para petani dalam penyediaan bibit pertanian yang berkualitas dan baik.

3.3. Air Bawah Tanah

Keterbatasan pelayanan air oleh Pemerintah baik untuk kebutuhan pertanian, perkebunan maupun kebutuhan air bersih belum dapat menjangkau ke seluruh masyarakat, yang menyebabkan masyarakat harus berupaya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih tersebut masyarakat melakukan pengeboran air tanah kegiatan industri, perhotelan dan melakukan pengeboran di lokasi pertanian, karena memang air irigasi sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian dan perkebunannya.

Namun pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air belum dilakukan secara maksimal terutama pengaturan terhadap pemanfaatan air bawah tanah untuk kepentingan industri, perhotelan dan kegiatan ekonomi lainnya, kendati kewenangan pengaturan pemanfaatan air tanah ini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, karena memang instansi atau lembaga teknis yang menangani pemanfaatan air tanah di Kabupaten Dompu,

baru terbentuk pada tahun 2007 yaitu Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

3.4. Kualitas Air

Penurunan kualitas air ini terjadi di kota-kota besar di Indonesia, namun di Kabupaten Dompu penurunan kualitas air ini masih sangat kecil, kendati selama ini belum dilakukan uji laboratorium terhadap mutu air di Kabupaten Dompu, namun hasil pengamatan dan pemantauan bahwa air sungai yang berada di Kota Dompu masih banyak warga masyarakat yang menggunakannya, baik untuk cuci pakaian maupun untuk mandi. Memang dari tahun ke tahun kualitas air sungai ini terus mengalami penurunan yang disebabkan adanya aktifitas penduduk yang meningkat, seperti kegiatan industri, rumah tangga, pasar, hotel, restoran dan aktifitas lainnya. Dari aktifitas penduduk tersebut menghasilkan limbah cair yang dibuang secara langsung ke sungai dan lingkungan, di samping limbah cair ini terdapat juga sampah, baik sampah organik maupun an organik yang kerap kali sungai dijadikan tempat pembuangan sampah oleh penduduk sekitar bantaran sungai. Hasil pemantauan Bapedalda Propinsi NTB tahun 2006, dengan menggunakan parameter detergen (MBAS) pada sungai Matua DAS Raba Baka melebihi standar baku mutu (0,02 mg/l) yaitu dibagian hulu 0,03 mg/l, dibagian tengah 0,3 mg/l dan hilir 0,5 mg/l.

Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak penurunan pada tingkat kesegaran dan kejernihan air sungai, bahkan akan terjadi pencemaran terhadap air sungai, yang akan mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat yang menggunakan air sungai sebagai sumber kehidupan mereka. Untuk mengantisipasi pencemaran air sungai, maka sejak sekarang program kali bersih (Prokasi) sudah harus dilakukan dan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah dan kotoran di sungai.

BAB IV

UDARA

Lingkungan udara disebut juga dengan Atmosfer yaitu selimut campuran gas yang menyelubungi planet bumi dengan ketinggian yang mencapai sekitar 500 km. tekanan udara pada permukaan bumi 76 cm Hg dan makin ke atas makin berkurang dan akhirnya hampa.

Menurut Ibnu Golib (1994) udara berperan sebagai :

1. Sumber CO_2 yang digunakan untuk proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan menjadi senyawa karbohidrat.
2. Menjadi sumber O_2 bagi manusia dan hewan serta mikroorganisme lainnya.
3. Menampung gas N_3 yang diubah oleh bakteri nitrifikasi menjadi senyawa nitrogen.
4. Menampung molekul-molekul air (H_2O) dan tempat berlangsungnya siklus hidrologis.

Dari peranan atmosfer di atas dapat dilihat bahwa pentingnya atmosfer adalah sebagai pelindung yang sangat baik, karena dapat menyerap sinar-sinar ultra violet yang dapat merugikan kesehatan manusia. Atmosfer juga mengatur panas bumi, namun sayangnya atmosfer juga merupakan wadah tempat penampungan kontaminan dan polutan dari kegiatan manusia di bumi.

Adapun komposisi udara tanpa uap air, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Komposisi Udara di Kabupaten Dompu

Jenis Gas	% Volume
N_2	76,68
O_2	20,93
Ar	0,93
CO_2	0,03
Ne	0,0018
He	0,0005
H_2	0,001
H_2O_2	$3,5 \times 10$
O_3	2×10

kemarau, meskipun belum dilakukan penelitian terhadap dampak dari pencemaran dari kotoran kuda ini, namun kalau kondisi ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan mempengaruhi terjadinya penurunan kualitas udara juga mengganggu kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan, penyakit paru - paru, infeksi mata dan penyakit lainnya.

2. Gas buang kendaraan roda dua maupun roda empat, yang tiap tahun mengalami peningkatan, inipun akan mempengaruhi kualitas udara dan dapat menambah gas rumah kaca;
3. Pembakaran hutan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan perladangan liar, juga berpotensi mempengaruhi kondisi udara dan gas rumah kaca.

Pemerintah Kabupaten Dompu dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Menggalakkan penanaman pohon pelindung di sepanjang jalan protokol, jalan arteri dan melakukan penataan taman kota;
2. Mengatur trayek yang bisa dilalui oleh kendaraan tradisional (*benhur*), pada tempat-tempat tertentu *benhur* dilarang beroperasi;
3. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan perladangan liar, kebakaran hutan secara terpadu dan terencana dengan melibatkan unsur terkait seperti Kepolisian, Pol-Hut, Pol-PP dan Kejaksaan Negeri Dompu;
4. Pemerintah Kabupaten Dompu telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Dompu yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentang Peladangan Liar;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Kebersihan Kota, Perda ini juga mengatur tentang sarana persampahan yang harus dimiliki setiap kendaraan yang melintas di Kabupaten Dompu, baik kendaraan Tradisional (*Benhur*), roda empat (kendaraan pribadi/umum).

Grafik 3.2 Suhu Rata-rata Bulanan

BAB V

LAHAN DAN HUTAN

5.1 Lahan

5.1.1 Kondisi Umum Lahan

Luas lahan pertanian menurut data yang diterbitkan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu pada Tahun 2005 Kabupaten Dompu adalah seluas 95.329 Ha yang meliputi sawah irigasi teknis 14.903 Ha, sawah tadah hujan 4.291 Ha. Lahan kering 21.106 Ha serta lainnya 55.029 Ha dan lahan efektif yang tergarap adalah hanya 42,3% dari luas lahan pertanian yang tersedia. Hasil produksi masih memiliki nilai surplus seperti padi tahun 2005 produksi 111.744 ton sedang kebutuhan konsumsi hanya 79.103 ton.

Data menunjukkan tingkat kebutuhan lahan pertanian dalam arti luas masih tersedia dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerusakan lahan yang diakibatkan oleh upaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan melalui kaidah-kaidah pemanfaatan yang tidak dapat mendorong pembentukan lahan kritis. Saat ini di Kabupaten Dompu lahan kritis yaitu sekitar 17.756 Ha berada dalam kawasan hutan dan 17.261 Ha berada di luar kawasan hutan atau berjumlah 35.017 Ha pada tahun 2004. lahan kritis dimaksud belum memiliki kriteria yang tegas, apakah kritis produksi, kritis secara fisik atau kritis secara ekonomis.

Apresiasi tentang definisi lahan kritis masih menjadi gambaran secara makro, yaitu : kawasan hutan akibat penebangan, perladangan ataupun lahan tidur akan diasumsikan sebagai lahan kritis. Kondisi kritis lahan tentunya harus ditentukan secara berjenjang menurut pemanfaatannya, misalnya : kelas kesuburan tanah yang meliputi kondisi kimiawi tanah, kondisi fisik tanah (tekstur), jenis tanah ataupun budaya pemanfaatan.

Pada suatu wilayah dengan kelas kesuburan tanah kelas I misalnya, tetapi masyarakat hanya memanfaatkan untuk kegiatan pengembalaan ternak maka pemanfaatan lahan akan sangat tidak optimal dan sebaliknya pada masyarakat petani (padi) ternyata terdapat kondisi kelas kesuburan tanah kelas II atau kelas III bahkan kelas V maka nilai hasil panen tidak akan optimal. Maka akibat pemanfaatan yang tidak tepat akan memunculkan anggapan bahwa lahan dimaksud kritis secara ekonomi.

5.1.2 Penyebab Terjadi Kerusakan Lahan

Degradasi lahan merupakan fenomena umum yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Dompu yang disebabkan oleh berbagai faktor :

1. Faktor Biofisik antara lain :
 - a. Letak Geografi Kabupaten Dompu yang berdekatan dengan benua Australia, dimana curah hujan yang singkat (3-4 bulan) sedangkan intensitas hujan yang tinggi, diikuti oleh musim kemarau panjang (7-9 bulan)
 - b. Iklim kering yang panjang menyebabkan laju infiltrasi dan penutupan lahan (land cover) rendah dan menyebabkan tingginya laju aliran permukaan, erosi dan resiko banjir.
2. Faktor Sosial, Budaya antara lain :
 - a. Peningkatan jumlah penduduk juga mempengaruhi kerusakan lahan dimana meningkatnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, papan, maupun sandang. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut semakin banyak lahan pertanian dan semakin banyak lahan pertanian dialih fungsikan untuk pengembangan wilayah pemukiman, sarana umum (jalan, gedung sekolah dan lain-lain).
 - b. Terbatas pengetahuan dan kemampuan inovasi masyarakat.
 - c. Kemiskinan.

5.2 HUTAN

5.2.1 Kondisi Umum Hutan

Secara administratif Kabupaten Dompu sampai akhir tahun 2004 terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) Desa, 9 Kelurahan, 41 Lingkungan dan 285 Dusun, dengan luas wilayah yaitu seluas 2.324,55 km² dan terdapat 65 (enam puluh lima) Desa/Kelurahan berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang berakibat pada kerawanan pemanfaatan lahan kawasan hutan tanpa ijin.

Luas Kawasan hutan di Kabupaten Dompu adalah seluas 114.495 Ha yang terdiri dari 9 (sembilan) RTK (Register Tanah Kehutanan) dengan penyebaran Areal di sekeliling wilayah Kabupaten Dompu. Adapun pembagian wilayah hutan menurut fungsi hutan balai investarisasi dan pemetaan hutan (BIPHUT) Mataram 2001 yang terdiri dari Kawasan Produksi tetap 25.285,81

Ha, Produksi Terbatas 28.797,80 Ha, Cagar Alam 2.435.50 Ha Suaka Marga Satwa 2.254,90 Ha serta hutan Lindung 49.189,34 Ha.

Potensi sumber daya hutan Kabupaten Dompu sangat potensial dari segi keanekaragaman maupun volume. Hasil Hutan Kayu (HHK) terdiri dari sekitar 150 jenis kayu komersil yang tersebar di seluruh kawasan hutan Kabupaten Dompu, jenis Rajumas (*Duabanga mollucana*, Sp.) sesuai data produksi HPH PT. Veneer Product Indonesia yang mengelola sejak tahun 1973 sampai tahun 2003 telah memproduksi sekitar 1,2 juta meter kubik kayu. Jenis-jenis kayu yang merupakan unggulan selain rajumas di antaranya : Mengi/Suren (*Toona Sureni*), Sawo kecil (*Manilkhara Kauki*), Ipil (*Intsia Bijuga*), Rondu/bungur (*Lagerstromia*, Sp.), Sambi/Kesambi (*Scheleicera Oleosa*), Walikukun (*Schoutenia Ovata*), Loa/Ketimis dan kayu bakau (sekitar 10 species).

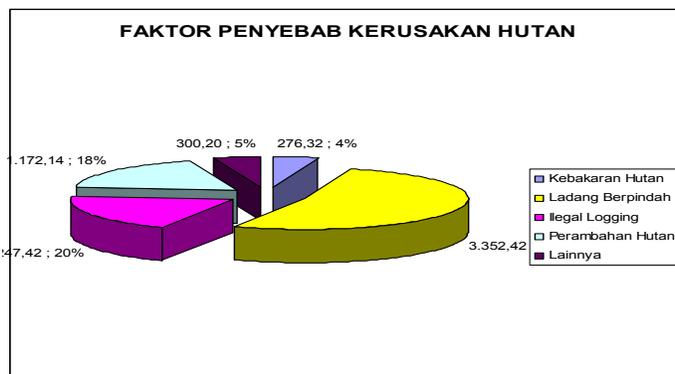
Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) belum dapat dimanfaatkan secara optimal, pemanfaatan baru sebatas kebutuhan masyarakat di antaranya seperti : Rotan (sekitar 10 jenis), Kayu Sepang, kayu Kuning, Kayu Manis, Madu, Bambu Hutan, Ketak (untuk bahan anyaman), dan Pandan Monyet. Investasi pengelolaan hasil hutan masih sangat kurang akibat belum dapat diinventaris potensi penyebaran maupun volume.

5.2.2 Kerusakan Hutan

Pengalaman menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan yang dilaksanakan pada masa lalu kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan yang berkelanjutan. Pemanfaatannya dilakukan secara tidak efisien dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanfaatan secara tidak terkendali yang berakibat pada kerusakan ekosistem, hidrologi dan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.

Kerusakan-kerusakan tersebut bila terus berlanjut tanpa adanya upaya-upaya perbaikan dan pengelolaan yang ditata secara sistematis dan terpadu dengan melibatkan semua *stakeholders*, maka dapat dipastikan akan terjadi degradasi secara drastis fungsi hutan dalam waktu singkat. Sejalan dengan itu kepunahan dan kelangkaan dari keanekaragaman hayati yang ada tidak dapat dihindari, sehingga pada generasi berikutnya hanya mendapat dampak negatif dari hal tersebut.





4. Perambahan Hutan

Perambahan hutan atau dapat dikatakan sebagai pemanfaatan kawasan hutan tanpa ijin dengan melakukan kegiatan usaha pertanian menetap dan diikuti pembangunan pemukiman yang merubah fungsi terjadi di beberapa Kawasan Hutan seperti pada beberapa wilayah hutan terjadi perluasan wilayah Desa ke dalam kawasan hutan. Menurut data tahun 2005 terdapat sekitar 1.172,14 Ha dengan sebaran yang tidak merata pada setiap Kelompok Hutan.

Tekanan Sosial Ekonomi terhadap hutan akibat aksesibilitas yang tinggi serta pertumbuhan jumlah penduduk yang berimplikasi pada kebutuhan pemenuhan ekonomi sehingga mendorong perambahan hutan yang cukup signifikan.

BAB VI

KEANEKARAGAMAN HAYATI

6.1 Kondisi Umum

Kabupaten Dompu salah satu Kabupaten yang dianugerahi oleh Allah SWT dengan kekayaan alam yang berlimpah, baik yang di darat, di laut dan di udara yang merupakan salah satu modal dalam melaksanakan pembangunan. Sumberdaya alam tersebut yang di dalamnya terdapat keanekaragam hayati dan ekosistem yang tumbuh dan berkembang yang harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan makhluk lain dengan ekosistemnya.

Keanekaragaman hayati baik yang berupa flora maupun fauna tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Dompu yang di dalamnya terdapat flora dan fauna yang dilindungi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar).

Keberadaan flora dan fauna baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi, seiring masih terjadinya peladangan liar, illegal logging, perburuan satwa, perdagangan satwa liar yang dilindungi, sementara usaha untuk melestarikan flora dan fauna masih sangat kurang.

6.1.1. Flora

Secara umum flora yang terdapat di wilayah Kabupaten Dompu yang terdapat pada kawasan hutan adalah kesambi/*Schlechera oleasa*, libi/*Eugnia densiflora*, Ipil/*Intasia Omboinensis*, Sala/*Pterospermum diversifolium*, Due, Beringin/*Ficus benyamina*, Asam/*Tamarindus indica*, Walikukun/Luhu/*Schoutenia ovata*, Jambu Hutan/Monggo/*Eugenia Polyantha*, Bidara/*Zizyphus Mauritinia*, sedangkan penyebaran flora yang dilindungi tidak merata di wilayah Kabupaten Dompu hanya terdapat pada daerah tertentu saja, seperti Ipil/*Intasia Omboinensis*, Sawo Kecil/*Manikara*

Kauki, Bayur/Pterocarps, Sp, Kayu Kuning/Cudrana, Sp, Kemiri/Alcuitas Moluccana, Sepang/Cacsalpinia, Beuang/Duabanga moluccana, Suren/Toona sinensis, Garu/Execearia Agallocha, Kelicung/Dyospyres macrophylla, Imba/Aza diraetha idica.

6.1.2. Fauna

Secara umum fauna yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Dompus yang terdapat kawasan hutan adalah Nuri Pipi Merah/*geoffroyus haematodus*, Tekukur biasa/*streptophelia chinensis*, Ayam Hutan Merah/*gallus gallus*, Ayam Hutan Hijau/*gallus varius*, Kekep Babi/*artamus leucorhynchus*, Babi Hutan/*sus sp.*, Rusa Timor/*cervus timorensis*, Kera Abu-Abu/*maccaca fascicularis*, Ular Hijau Ekor Merah, Ular Phytan/*phyton reticulates*, Biawak Timor/*varanus timorensis*, Bangau Tongtong/*letotiles javanicus*, Burung Gosong/*megapodius reinwardtii*, Landak/*hystrik brachyuran*.

6.2 Flora dan Fauna di Kawasan Tambora

Secara administratif, kawasan Gunung Tambora terbagi dalam 2 Kabupaten: Dompus dan Bima. Total Kawasan hutan gunung Tambora seluas $\pm 134.251,35$ ha telah ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki beranekaragam fungsi, yaitu sebagai hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman buru;

6.2.1 Flora

Berdasarkan hasil pengamatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB tahun 2007, jenis vegetasi cukup bervariasi dan kaya akan jenis terutama pada daerah-daerah yang topografinya agak datar dan bergelombang serta berada pada ketinggian di atas permukaan laut berkisar antara 200 m – 700 m. Sedangkan pada ketinggian di atas 700 m dari permukaan air laut jenis vegetasi berkurang hanya merupakan hutan sekunder yang dinominasi oleh jenis perdu dan semak, sedangkan pada ketinggian di atas 1200 m dpl hanya padang rumput/savanna yang dinominasi oleh jenis rumput alang-alang, rumput gelagah dan lantana.

Penyebaran vegetasi cukup merata pada daerah-daerah yang ketinggian 200 m - 700 m dpl, namun pada daerah-daerah tertentu masih dijumpai pertumbuhan vegetasi yang relatif sedikit, hal ini diperkirakan karena terjadinya peladangan liar, illegal logging, kegiatan perburuan satwa dan pencarian madu oleh masyarakat yang ada di sekitar kawasan.

Flora atau tumbuh-tumbuhan yang terdapat di wilayah Kabupaten Dompu khususnya di Wilayah Gunung Tambora pada kawasan suaka marga satwa yang berhasil dilakukan indentifikasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel. 6.1
Jenis Flora yang terdapat di Kawasan Suaka Marga Satwa
di Gunung Tambora tahun 2007

NO	JENIS FLORA	NAMA LATIN
1	Soka	<i>Ardisia javanica</i>
2	Kalanggo	<i>Duabanga Moluccana</i>
3	Pulai/Rida	<i>Aletonia S. Pectabilis</i>
4	Bungur/Rondu	<i>Lagestremia speciosa</i>
5	Walikukun/Luhu	<i>Schoutenia ovata</i>
6	Wangkal	<i>Albizia procera</i>
7	Kesambi/sambi	<i>Schlechera oleasa</i>
8	Linggua	<i>Pterocarpus indicus</i>
9	Asam/Mangge doro	<i>Tamarindus indica</i>
10	Jambu Hutan/Monggo	<i>Eugenia Polyantha</i>
11	Laban	<i>Vitex pubescens</i>
12	Cerme Hutan	<i>Phyllonthusacidus sheels</i>
13	Ketapang/karano	<i>Terminalia catappa</i>
14	Bidara	<i>Zizyphus Mauritinia</i>
15	Ringgi Doro/Beringin	<i>Ficus benyamina</i>
16	Tula/Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>
17	Libi	<i>Eugnia denasiflora</i>
18	Nangga	<i>Palaquium obtusifolium</i>
19	Sala/bajur	<i>Pterospermum diversifolium</i>
20	Due/beringin	<i>ficus benjamina</i>
21	Pato/Dadap	<i>Erythrina sp</i>
22	Rapu	<i>Leea sp.</i>
23	Katowi/Ampupu	<i>Eucalyptus sp.</i>
24	Mengi/Suren	<i>Toona sureni</i>
25	Rau/Dao	<i>Dracontomelon dao</i>
26	Rino	<i>Grewia koordersiana</i>
27	Heci	<i>Canarium oleosum</i>
28	Loa/Ketimis	<i>Protium javanicum</i>
29	Wau/Waru	<i>Hibiscus tiliaceus</i>
30	Cemara	<i>Casuarina junghuhniana</i>
31	Bara	<i>Tetrameles nudiflora</i>
32	Mpusu	<i>Ficus sp</i>
33	Na'a	<i>Ficus sp</i>
34	Rumput	<i>Cyperus ratundus</i>
35	Ati/Alang-alang	<i>Imperata cylindrica</i>
36	Katipu	<i>Planchonia valida</i>

37	Temba	<i>Albizzia Lebbeck</i>
38	Lantana	<i>Lantana Cemara</i>
39	Ki rinyuh	<i>Eupatorium odoratum</i>
40	Sabia/Lada Hutan	<i>Piper Sp</i>
41	Ndolo/Rumput Gelagah	
42	Silo	

Sumber Data : Balai KSDA Propinsi NTB

6.2.2. Fauna

Kawasan gunung Tambora merupakan habitat beberapa jenis fauna endemik dan sebaran terbatas, walaupun belum dilakukan penelitian tentang jumlah penyebaran fauna yang ada di gunung Tambora dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan habitatnya, hal ini disebabkan masih terjadinya peladangan liar, illegal logging, perambahan hutan di sekitar kawasan tambora sehingga mengurangi tempat berkembangbiak dan tempat bersarangnya beberapa fauna dan sering dilakukan perburuan satwa seperti Rusa, Babi Hutan, Ayam Hutan juga berpengaruh terhadap jumlah populasi dan penyebaran fauna tersebut.

Fauna yang terdapat di wilayah Kabupaten Dompu khususnya di Wilayah Gunung Tambora pada kawasan suaka marga satwa yang berhasil dilakukan indentifikasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB Tahun 2007 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel. 6.2
Jenis Fauna yang terdapat di Kawasan Suaka Marga Satwa
di Gunung Tambora tahun 2007

NO	JENIS FLORA	NAMA LATIN
I.	Aves	
1	Burung Paruh Bengkok :	
	- Kakatua Putih Kecil Jambu Kuning	<i>Cacatua Sulphurea</i>
	- Nuri Pipi Merah	<i>Geoffrayus geoffroyi</i>
	- Perkici Pelangi	<i>Trichoglossus haematodus</i>
	- Perkici Timur	<i>Trichoglossus euteles</i>
	- Elang Alap Besra	<i>Accipiter virgatus</i>
	- Elang Bondol	<i>Haliastur indus</i>
	- Elang Perut Karat	<i>Hieraaetus kieneril</i>
	- Celepuk Wallacea	<i>Otus silvicola</i>
2	Tekukur Biasa	<i>Streptopelia chinensis</i>
3	Merpati Hutan Metalik	<i>Columba vitiensis</i>
4	Dederuk Jawa	<i>Streptopelia bitorquata</i>
5	Pergam Punggung Hitam	<i>Ducula lacermulata</i>

6	Punai Gagak	<i>Treron sphenura</i>
7	Wiwik Uncuing	<i>Cacomantis sepulclaris</i>
8	Raja Udang Erasia	<i>Alcedo atthis</i>
9	Kiciut Batu	<i>Motacilla cinerca</i>
10	Kiciut Kerbau	<i>Motacilla flava</i>
11	Srigunting Wallancea	<i>Dicrurus densus</i>
12	Kepudang Kuduk Hitam	<i>Oriolus chinensis</i>
13	Gelatik Batu Belabu	<i>Parus major</i>
14	Anis Nusa Tenggara	<i>Zoothera dohertyi</i>
15	Anis Kembang	<i>Zoothera interpress</i>
16	Ceret Gunung	<i>Cettia vulcania</i>
17	Cikrak Daun	<i>Phylloscopus trivirgatus</i>
18	Kacamata Wallance	<i>Zosterops wallacei</i>
19	Kacamata Biasa	<i>Zosterops palpebrosus</i>
20	Kacamata Laut	<i>Zosterops chloris</i>
21	Opor Flores	<i>Lophozosterops</i>
22	Sikatan Rimba Ayun	<i>superciliaris</i>
23	Sikatan Bodoh	<i>Rhinomyias oscillans</i>
24	Sikatan Dada Merah	<i>Ficedula hyperytra</i>
25	Seriwang Asia	<i>Ficedula dumetoria</i>
26	Kahicap Flores	<i>Tersiphone paradise</i>
27	Kahicap Kacamata	<i>Monarcha sacerdotum</i>
28	Sikatan Paruh Lebar	<i>Monarcha trivirgatus</i>
29	Kipasan Flores	<i>Myiagra ruficollis</i>
30	Kancilan Flores	<i>Rhipidura diluta</i>
31	Kekep Babi	<i>Pachycephalla</i>
32	Tiong Emas	<i>Artamus leucorhynchus</i>
33	Cikukua Tanduk	<i>Gracula religiosa</i>
34	Isap Madu Topi Sisik	<i>Philemon buceroides</i>
35	Burung Madu Sriganti	<i>Lichmera lombokia</i>
36	Burung Madu Mentari	<i>Nectarinia jugularis</i>
37	Cabai Dahi Hitam	<i>Nectarinia solaris</i>
38	Cabai Gunung	<i>Dicaeum igniferum</i>
39	Cabai Lombok	<i>Dicaeum sanguinolentum</i>
40	Sepah Kerdil	<i>Dicaeum maugei</i>
41	Sepah Hutan	<i>Pericrocotus lansbergei</i>
42	Ayam Hutan Merah	<i>Pericrocotus flammeus</i>
43	Ayam Hutan Hijau	<i>Gallus gallus</i> <i>Gallus varius</i>
II	Mamalia	
1	Babi Hutan	
2	Rusa Timor	<i>Sus Sp</i>
3	Kera Abu-abu	<i>Cervus timorensis</i> <i>Maccaca Fascicu ;aris</i>
III	Reptil	
1	Ular Hijau Ekor Merah	
2	Ular Phytan	
3	Biawak Timor	<i>Phyton reticulates</i> <i>Varanus timorensis</i>

Sumber Data : Balai KSDA Propinsi NTB

6.3 Flora dan Fauna di Taman Wisata Alam Pulau Satonda

Pulau Satonda, sebuah pulau Vulkanik yang terletak di Laut Flores, 3 Km dari semenanjung Sanggar atau 30 Km dari Gunung Tambora yang berada di daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif Pemerinatahan berada di Wilayah Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus, secara geografis terletak pada 8° 05' 53" - 8° 07' 15" Lintang Selatan dan 117° 43' 59" - 117° 45' 27" Bujur Timur.

Mengacu pada Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 7 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom pada pasal 2 ayat (4) serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai KSDA, penyelenggaraan pengelolaan TWA Pulau Satonda dan Perairan di sekitarnya dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam NTB dan Konservasi Alam. Berdasarkan wilayah pemangkuan kawasan TWA Pulau Satonda dan Perairan di sekitarnya berada di bawah pengelolaan Seksi Konsevasi Wilayah II Bima, Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB.

6.3.1 Kondisi Flora

Secara umum tipe vegetasi di Taman Wisata Alam Satonda adalah Hutan Panati dan Tropis daratan rendah, dengan jenis antara lain Asam/tamarindus indica, Kalibuda/excoecaria agallocha, Ketimis/protium javanicum, Berora/kleinhovia hospita, Kesambi/schleicera oleosa, Bidara, Kayu Batu, Kayu Daru, Kayu Jawa, Beringin/ficus sp, Tempawe, Bambu/bambusa sp. Sedangkan vegetasi pantai seperti Nyamplung/calophyllum inophyllum, Waru Laut/hibiscus sp. dan Pandan Laut/pandanus tectorius.

6.3.2 Kondisi Fauna

Beragam-macam jenis satwa dapat ditemui di Kawasan TWA Satonda, Satwa dari kelas Mamalia yang dapat ditemui antara lain Rusa (Cervus Timorensis), Babi Hutan (Sus scrova), Kera Ekor panjang (Macacafascicularis), Landak (Hystrix Javanica) dan Kelelawar. Jenis-jenis Satwa dari kelas Reptilia yang dapat ditemui antara lain Biawak (Varanus Sp), Ular Piton (Phyton Sp). Sedangkan jenis-jenis burung yang dapat

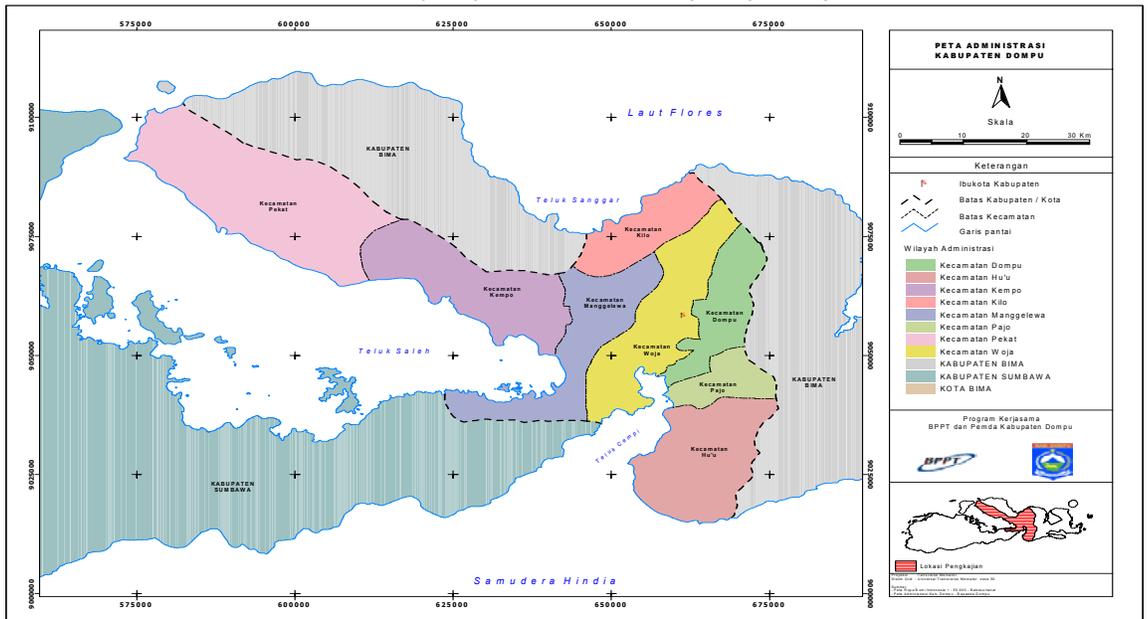
ditemui antara lain Burung Gosong (*Megapodius reinwardtii*), Kepondang, Pergan, Bangau Putih/Abu Kecil, Itik Air, Burung Raja Udang dan Tekukur.

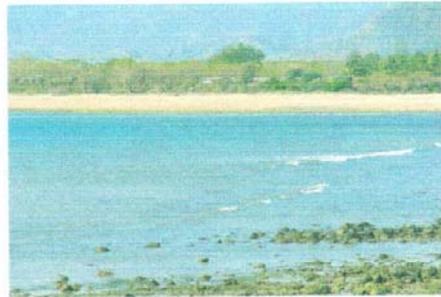
Berdasarkan hasil inventasi potensi flora di Taman Wisata Alam Pulau Santonda yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB tahun 2006, adalah sebagai berikut :

Tabel. 6.3
Jenis Flora yang terdapat Di Taman Wisata Alam
Pulau Santonda Tahun 2006

No.	Nama Jenis	Nama Latin
1.	Rida	-
2.	Kirinyu Golkar	<i>Opatorium Odoratum</i>
3.	Feli	<i>Streblus asper</i>
4.	Ndaru	-
5.	Cito	-
6.	Songga	-
7.	Bambu	<i>Bambusa Vulgaris</i>
8.	Mbesi	-
9.	Silo / Tanjung	<i>Mimosops Elengi</i>
10.	Kara	-
11.	Rino / Tolah	<i>Grewia Koodersiana</i>
12.	Tula / Pulai	<i>Alstonia Scholaris</i>
13.	Loka	<i>Pittospermum Ferugenium</i>
14.	Jarak	<i>Jatropha Curcas</i>
15.	Arunana / Kayu Api	<i>Dyospiros Sp.</i>
16.	Wamba	-
17.	Loak / Ketimis	<i>Protium Javanicum</i>
18.	Sarea / Saraa	<i>Zyzyphus Celtidifolia</i>
19.	Sambi / Kesambi	<i>Schleicera oleosa</i>
20.	Ndao	-
21.	Mposu	<i>Ficus sp</i>
22.	Edu	-
23.	Kedondong	<i>Spondias Pinata</i>
24.	Katanga	-
25.	Asam	<i>Tamarindus Indicus</i>
26.	Rangga	-
27.	Ira	-
28.	Bidara	<i>Zyzyphus Numularia</i>
29.	Kalibuda	<i>Exoecaria Agallocha.</i>
30.	Ringi Doro	<i>Gosampinus Malabarica.</i>
31.	Rondu / Bungur	<i>Lagerstroemia Speciosa</i>

Sumber Data : Balai KSDA Propinsi NTB





7.1.2. Kondisi Oseanografi

7.1.2.1. Gelombang

Tinggi gelombang lebih besar pada periode musim barat dibandingkan dengan periode musim timur. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,5 m - 1,0 m, dengan gelombang tertinggi pada musim barat yang mencapai 1,5 m.

7.1.2.2. Pasang Surut (Pasut)

Tipe Pasut di perairan pesisir dan laut Kabupaten Dompu berbeda-beda. Contohnya di Teluk Cempi Kabupaten Dompu adalah: Tipe Pasut Campuran cenderung Harian Ganda (*Mixed Semi Diurnal*)

7.1.2.3. Arus

Kondisi arus di wilayah pesisir dan laut secara umum sebagai berikut: Kecepatan arus maksimum adalah sebesar 0,34 knot dengan arah 60° (arus pasang) dan tercatat 0,22 knot dengan arah 225° (arus surut). Dari perhitungan arus pasang surut diketahui bahwa kecepatan maksimum arus pada waktu air menuju pasang sebesar 0,30 knot dengan arah 54°. Sedangkan pada waktu surut sebesar 0,26 knot dengan arah 234°. Untuk kecepatan arus non pasang (arus tetap) sebesar 0,06 knot dengan arah berkisar 87°-152°.

7.1.2.4. Batimetri Perairan Pesisir dan Laut

Perairan pesisir dan laut (Teluk) memiliki kedalaman secara umum landai mulai dari muara sungai di bagian hulu teluk hingga radius 5 kilometer. Kedalaman berkisar antara 0 – 5 meter. Pada radius 5 - 10 kilometer, kedalaman ke tiga Teluk berkisar antara 5 – 10 meter, dan mulai radius 10 hingga menuju mulut teluk, kedalaman perairan semakin dalam dengan kisaran antara 10 hingga 100 meter.

7.2. Kondisi Hutan Mangrove

Luas hutan yang berada di Kabupaten Dompu adalah seluas 1.432,57 Ha. Kawasan hutan mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perairan teluk. Wilayah yang didominasi oleh Hutan Mangrove di Kabupaten

Dompu adalah di wilayah Pesisir dan Laut Teluk Cempi. Wilayah Teluk Cempi mempunyai beberapa muara sungai, salah satunya adalah sungai Mendunga, muara sungai ini merupakan jalur nelayan untuk mencari ikan, udang dan rajungan sekitar pantai. Muara sungai mempunyai jarak sekitar 7 km sampai bibir pantai, pasang surut tertinggi terendahnya mencapai 2 m dan lebar sungai sekitar 10 m.

Secara umum keadaan ekologis hutan mangrove Teluk Cempi relatif masih alami walaupun ada sedikit kerusakan akibat aktivitas penduduk untuk kebutuhan kayu bakar dan ada beberapa lokasi yang telah mengalami konversi lahan menjadi tambak udang. Vegetasi dominan yang tumbuh sepanjang hutan mangrove adalah jenis *Avicennia* sp. dan *Rhizophora* Sp. Keberadaan hutan mangrove menjadi hal yang sangat penting bagi siklus ekologi dan rantai makanan.

Usaha reboisasi oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu melalui program Gerakan Nasional Reboisasi Hutan dan Lahan yang bekerjasama dengan LSM PLAN telah melakukan penanaman bibit mangrove seluas 8 Ha, dengan metoda silvikultur dan parit sekitar tambak serta penanaman di muara sungai. Namun hasil pengamatan ternyata metode silvikultur dan parit di areal pertambakan lebih berhasil dari pada penanaman di muara sungai (< 10%).

Hutan mangrove memiliki dua aspek yang cukup strategis baik secara ekologis maupun ekonomis. Potensi ekologis lebih ditekankan pada kemampuan hutan mangrove untuk mendukung eksistensi lingkungan, sebagai hutan air asin, penahan angin, penahan gempuran ombak, pengendali banjir dan tempat persembunyian, mencari makan dan daerah asuhan dari berbagai macam binatang, sehingga sulit dinilai dengan uang. Sedangkan potensi ekonomi ditunjukkan dengan kemampuan hutan mangrove dalam menyediakan produk yang dapat diukur dengan uang, seperti kayu.

Selanjutnya, ekosistem mangrove memiliki sejumlah fungsi dan manfaat penting, seperti: (i) sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur, dan perangkap sedimen; (ii) penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon mangrove; (iii) daerah asuhan, daerah mencari makanan dan daerah pemijahan berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya; (iv) penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku

arang, dan bahan baku kertas (pulp); (v) pemasok larva ikan, udang dan biota laut lainnya; (vi) sebagai tempat wisata.

Peran kritis dari ekosistem mangrove berkaitan dengan tingginya laju produktivitas primer mereka. Biomassa bahan organik yang berasal dari akar dan daun membentuk jaring makanan yang kompleks, meliputi berbagai jenis hewan yang tidak bertulang belakang seperti krustasea dan moluska, ikan, mamalia, reptil dan burung. Sejumlah jenis udang ekonomis penting seperti *Penaeus monodon* dan *P. indiem* berasosiasi dengan mangrove selama stadia tertentu dalam siklus hidupnya. Siklus hidup dari udang (*Penaeus tnerguiemis*) erat sekali berasosiasi dengan mangrove. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang erat antara total area hutan mangrove dan hasil tangkapan udang ekonomis di lepas pantai. Hubungan yang positif tersebut mungkin disebabkan: (i) mangrove merupakan sumber penting dari detritus dan nutrien yang merupakan sumber bahan bakar dalam jaringan rantai makanan di dekat pantai; dan (ii) mangrove berperan sebagai daerah asuhan dan daerah mencari makanan bagi beberapa jenis biota laut. Selain udang, sumberdaya perikanan yang terdapat di Teluk Cempi adalah ikan pelagik kecil yang cukup potensial.

Dari beberapa uraian tentang kondisi wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Dompu, maka dapat disimpulkan beberapa kondisi nyata yang terjadi antara lain :

1. Terjadi Kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir dan laut Teluk Cempi secara besar-besaran.
2. Terjadi kerusakan terumbu karang.

7.3 Penyebab Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Dompu

7.3.1. Kerusakan Hutan Mangrove

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan mangrove secara tak terkendali selama ini, antara lain sebagai berikut :

1. Karena ketidaktahuan kita tentang arti dan peran penting mangrove bagi kehidupan, termasuk manusia.
2. Kurangnya penguasaan kita tentang teknik-teknik pengelolaan mangrove yang ramah lingkungan.
3. Penebangan mangrove untuk kayu bakar/arang.
4. Penebangan mangrove untuk kayu bangunan.

5. Penebangan mangrove untuk pagar halaman dan kebun.

7.3.2. Kerusakan Terumbu Karang

Di wilayah Kabupaten Dompu, ada beberapa penyebab kerusakan terumbu karang, antara lain :

1. Kerusakan terumbu karang akibat pengeboman. Kegiatan pengeboman dimaksudkan untuk dapat menangkap ikan dengan cara yang cepat. Kegiatan ini dilakukan karena umumnya masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang manfaat dan arti penting dari keberadaan terumbu karang.
2. Kerusakan terumbu karang dengan cara potasium. Kasus yang terjadi di Dompu adalah kegiatan potasium dimaksudkan untuk menangkap Lobster (udang barong) dan ikan hias pada daerah terumbu karang.

7.3.2. Dampak Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut

7.3.2.1. Kerusakan Hutan Mangrove

Dampak dari kerusakan hutan mangrove yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat Dompu adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan berkurangnya hutan mangrove dari hari ke hari, maka akan mengurangi media peredam/penghalang gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen. Karena sadar atau tidak, bahwa hutan mangrove dapat berfungsi sebagai peredam gelombang atau LANO MPANGA (istilah lokal) atau pasang tinggi yang menghantui para petambak di Kabupaten Dompu.
- 2) Berkurangnya fungsi hutan mangrove sebagai penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon mangrove.
- 3) Berkurangnya fungsi hutan mangrove sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makanan (*feeding ground*) dan daerah pemijahan (*spawning ground*) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya. Pada dekade awal tahun 90-an, Kabupaten Dompu terkenal dengan kualitas Induk Udangnya, dan bahkan tercatat nomor dua setelah daerah Aceh. Kondisi

sekarang, ada kecenderungan menurun kualitas induk udangnya seiring dengan semakin berkurangnya hutan mangrove.

- 4) Berkurangnya fungsi hutan mangrove sebagai pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya.

7.3.2.2. Kerusakan Terumbu Karang

Dampak dari kerusakan terumbu karang, antara lain :

1. Rusaknya daerah asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makanan (*feeding ground*) dan daerah pemijahan (*spawning ground*) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya.
2. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan.
3. Daerah penangkapan ikan akan semakin jauh dari pantai.

BAB VIII

AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa ***pengelolaan lingkungan hidup*** adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pembangunan yang akan dilakukan di wilayah Kabupaten Dompu diharapkan terus memperhatikan fungsi lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Dompu yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Dompu Yang Sejahtera Dan Religius Tahun 2020 Disemangati Oleh Ngahi Rahi Pahu"***.

Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan metode S-P-R (State-Pressure, Respon) terhadap isu lingkungan hidup di Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya air semakin berkurang;
2. Penurunan Kualitas air sungai;
3. Meluasnya lahan kritis;
4. Pengelolaan sampah dan kebersihan yang belum optimal;
5. Kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove;
6. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, sarana umum dan jalan;
7. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Dompu ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM), dengan memperhatikan beberapa program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJM Nasional dan RPJM Propinsi NTB sepanjang ada kaitan dengan potensi dan rencana pembangunan Kabupaten Dompu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Kabupaten Dompu Tahun 2005-2010 disusun dengan memperoleh masukan dari RENSTRA-SKPD masing-masing instansi se-Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Bendungan dan Jaringan Irigasi.
 - ♣ Pembangunan Bendungan/Embung dan Jaringan Irigasi Baru
 - ♣ Rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi
2. Program pengembangan potensi air tanah
 - ♣ Pembuatan Sumur Pompa Dalam;
3. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - ♣ Normalisasi air sungai
 - ♣ Pengelolaan Kali bersih
 - ♣ Pemantauan Kualitas Air Sungai
4. Program Pengendalian dan pengawasan Hutan
 - ♣ Pemberantasan pencurian kayu hutan dan perdagangan kayu ilegal;
 - ♣ Pengawasan pengelolaan hutan
5. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - ♣ Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - ♣ Pembibitan Bakti Sosial
6. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya Alam;
 - ♣ Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya air
 - ♣ Pengendalian Kerusakan hutan dan Lahan
 - ♣ Pantai dan Laut Lestari
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
 - ♣ Pengurangan timbunan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumber sampahnya
 - ♣ Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra dalam pengelolaan
 - ♣ Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem persampahan
 - Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan Kabupaten
 - Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran
 - Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan
 - Mengembangkan TPA ke arah Control landfill.
 - ♣ Pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah
 - Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara stakeholder
 - ♣ Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

- Menyasakan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan
 - Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan
8. Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- ♣ Pengelolaan dan Rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuari dan teluk.
 - ♣ Pengendalian Dan Pengawasan Kerusakan Hutan Mangrove.
 - ♣ Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
 - ♣ Penyuluhan dan sosialisasi pengelolaan lingkungan
9. Program Pengendalian dan Pemanfaatan ruang
- ♣ Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - ♣ Penyusunan Rencana Tata Ruang berdasarkan hirarki/tingkatan produk perencanaan sehingga tercapai out put perencanaan
 - ♣ Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat
 - ♣ Penyusunan evaluasi perencanaan untuk mengetahui tingkat penyimpangan terhadap rancangan tata ruang yang ada.
 - ♣ Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
10. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- ♣ Pemberdayaan ekonomi masyarakat pinggir kawasan hutan
 - ♣ Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir pantai
 - ♣ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
11. Program Penyusun Kebijakan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR PUSTAKA

- Anonm, 2007, Pedoman Umum Penyusunan Laporan dan Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah 2007, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta.
- Anoni, 2006, Status Lingkungan Hidup Propinsi NTB, Bapedalda Propinsi NTB.
- Anonim, 2007, Penyusunan Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kota Dompu, Bappeda Kabupaten Dompu.
- Anonim, 2006, Rencana Umum Tata Ruang Laut dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Dompu, Dinas Perikanan dan KElautan Propinsi NTB.
- Anonim, 2007, Kajian Sebaran Habitat Burung Paruh Bengkok di Suaka Marga Satwa Gunung Tambora, Balai KSDA Propinsi NTB.
- Anonim, 2007, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Dompu (2005-2010), Bappedal Kabupaten Dompu.
- Anonym, 2006, Dompu Dalam Angka 2005, BPS Kabupaten Dompu.
- Anonim, 1997, Inventarisasi Potensi Flora Dan Fauna Di Suaka Marga Satwa Gunung Tambora Selatan, Balai KSDA Propinsi NTB.
- Anonim, 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu, Bappeda Kabupaten Dompu.
- Anonim, 2006, Inventarisasi Potensi Flora di Taman Wisata Alam Pulau Satonda, Balai KSDA Propinsi NTB.
- Anonim, 2006, Rencana Strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu.
- Anonim, 2006, Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu.
- Anonim, 2006, Pemantauan Kualitas Air Sungai Yang Melintas Ibu Kota Kabupaten/Kota Dan Air Bersih (PDAM dan Non PDAM) Se-NTB, Bappedalda Propinsi NTB.